



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan limpahan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo Tahun 2025 ini dapat terselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Sidoarjo atas penggunaan anggaran. Fokus utama dalam menyusun Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Selama tahun 2025, KPKNL Sidoarjo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 yang terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2025 dengan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPKNL Sidoarjo. Laporan Kinerja ini juga menggambarkan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi di tahun 2025 serta langkah-langkah yang telah diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, telah didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 sebesar 118,77%. Nilai tersebut berasal dari penjumlahan capaian empat perspektif dalam *Balanced Scorecard* Kementerian Keuangan, yaitu 33,18% *Stakeholder Perspective* (bobot 30%), 23,06% *Customer Perspective* (bobot 20%), 29,44% *Internal Process Perspective* (bobot 25%), dan 30,00% *Learning and Growth perspective* (bobot 25%). Pencapaian tersebut di antaranya tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPKNL Sidoarjo dengan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Triwulan I sebesar 5,85 (dalam skala 6), Triwulan II sebesar 5,86 (dalam skala 6), Triwulan III sebesar 5,88 (dalam skala 6), dan Triwulan IV sebesar 5,89 (dalam skala 6), serta Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan I sebesar 5,92 (dalam skala 6), Triwulan II sebesar 5,93 (dalam skala 6), Triwulan III sebesar 5,94 (dalam skala 6), dan Triwulan IV sebesar 5,94 (dalam skala 6). Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Sidoarjo dan DJKN di mata pengguna layanan dan masyarakat serta menambah semangat bagi pegawai KPKNL Sidoarjo dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Laporan Kinerja KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Sidoarjo Tahun 2025, diharapkan dapat memenuhi harapan dan menjadi referensi dalam pengelolaan kinerja di masa mendatang, serta sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja KPKNL Sidoarjo.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Untung Sudarwanto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUES</i>)	7
D. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA	14
C. PENGUKURAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	73
C. REALISASI ANGGARAN	77
BAB IV PENUTUP	79
Lampiran 	80



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 adalah iktisar yang menjelaskan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2025 dengan target yang terdapat dalam PK Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Sidoarjo atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL selama tahun 2025.

Visi KPKNL Sidoarjo selaras dengan visi DJKN, di mana visinya adalah “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam mencapai visi tersebut DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misi KPKNL Sidoarjo juga selaras dengan misi DJKN, yaitu (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut KPKNL Sidoarjo menetapkan tujuan strategis sebagaimana yang hendak dicapai DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi

KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta Strategi KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 memuat 8 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (3) Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa; (4) Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif; (5) Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif; (6) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif; (7) Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif; dan (8) Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran setrategis, diukur dengan IKU. Kualitas IKU didasarkan pada kriteria *SMART-C* (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously Improved*). Pada tahun 2025 dihasilkan 18 IKU pada level eselon III yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur dengan Kepala KPKNL Sidoarjo. Hampir secara keseluruhan target IKU KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 telah tercapai, dengan capaian NKO sebesar 118,77%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di KPKNL Sidoarjo telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik. Capaian IKU yang telah mencapai target terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan. Untuk IKU yang belum mencapai target, akan diupayakan untuk dapat tercapai targetnya di tahun berikutnya. Untuk itu, KPKNL Sidoarjo terus bekerja keras dan cerdas, sehingga kualitas organisasi yang kondusif dapat terus meningkat.

Semangat kerja dengan motto “KOMPAK” yang diterjemahkan sebagai rangkaian huruf yang berarti KOMitmen, Profesional, Amanah, dan Kesempurnaan senantiasa ditanamkan pada diri masing-masing Pegawai KPKNL Sidoarjo untuk tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan dan masyarakat.



An illustration of a hand in a blue sleeve holding a rolled-up document. The document is yellow with a green band and a red seal. The background is a light beige color with a subtle pattern of overlapping circles. The hand is positioned on the left side of the frame, with the fingers wrapped around the document. The document is held horizontally, and the hand is pointing towards the right.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo merupakan instansi vertikal unit Eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Sidoarjo sebagai kepanjangan tangan dari DJKN di daerah, dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), yang salah satu azasnya adalah akuntabilitas, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam azas akuntabilitas, disebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas KPKNL Sidoarjo berdasarkan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL Sidoarjo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan, negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan susunan organisasi terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Bagan 1.1.

1. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis,

penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

5. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional pada KPKNL Sidoarjo terdiri dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, Pelelang, dan Pranata Keuangan APBN.

KPKNL Sidoarjo sendiri beralamat di Jalan Erlangga Nomor 161, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Adapun wilayah kerja KPKNL Sidoarjo meliputi 3 Kabupaten dan 2 Kota di Jawa Timur, yang terdiri dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi KPKNL Sidoarjo



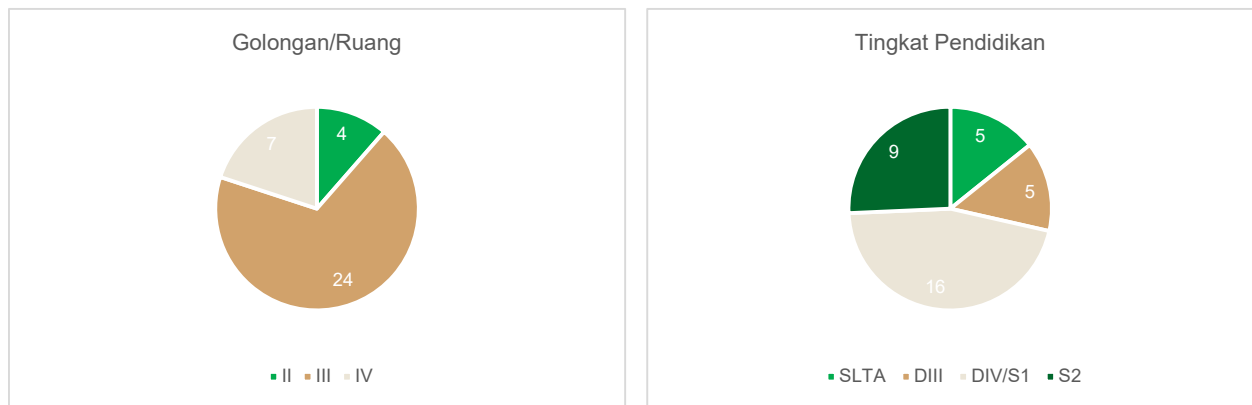
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Sidoarjo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 35 orang pejabat/pegawai yang terdiri dari seorang Kepala Kantor, seorang Kepala Subbagian Umum, 4 orang Kepala Seksi, seorang Peluang Ahli Madya, 5 orang Peluang Ahli Muda, seorang Peluang Ahli Pertama, 2 orang Penilai Pemerintah Ahli Muda, 2 orang Penilai Pemerintah Ahli Pertama, seorang Pranata Keuangan APBN Terampil, dan 17 orang Pegawai Pelaksana. Adapun komposisi pejabat/pegawai dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai KPKNL Sidoarjo Berdasarkan Pendidikan dan Golongan/Ruang

Tingkat Pendidikan	Golongan/Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	2	3	-	5
DI	-	-	-	-	-

DIII	-	2	3	-	5
D4/S1	-	-	17	0	17
S2	-	-	1	7	8
S3	-	-	-	-	-
Jumlah	-	4	24	7	35

Diagram 1.1.
Komposisi Pegawai KPKNL Sidoarjo Berdasarkan Pendidikan dan Golongan/Ruang



Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai KPKNL Sidoarjo Berdasarkan Umur dan Golongan/Ruang

Kelompok Umur (Tahun)	Golongan/Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
< 21	-	-	-	-	-
21-30	-	1	-	-	1
31-40	-	1	9	-	10
41-50	-	-	9	4	13
> 50	-	2	6	3	11
Jumlah	-	4	24	7	35

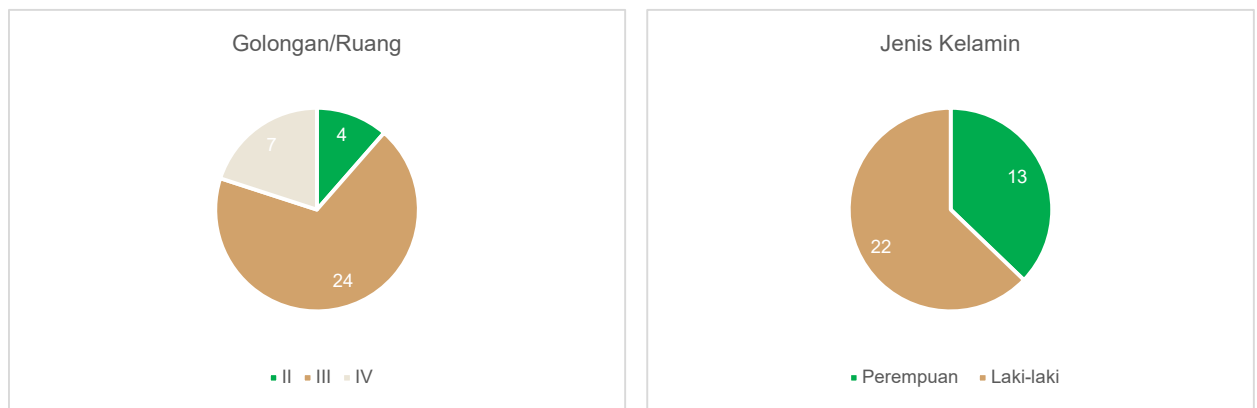
Diagram 1.2.
Komposisi Pegawai KPKNL Sidoarjo Berdasarkan Umur dan Golongan/Ruang



Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai KPKNL Sidoarjo Berdasarkan Gender dan Golongan/Ruang

Jenis Kelamin	Golongan/Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	1	11	1	13
Laki-laki	-	3	13	6	22
Jumlah	-	4	24	7	35

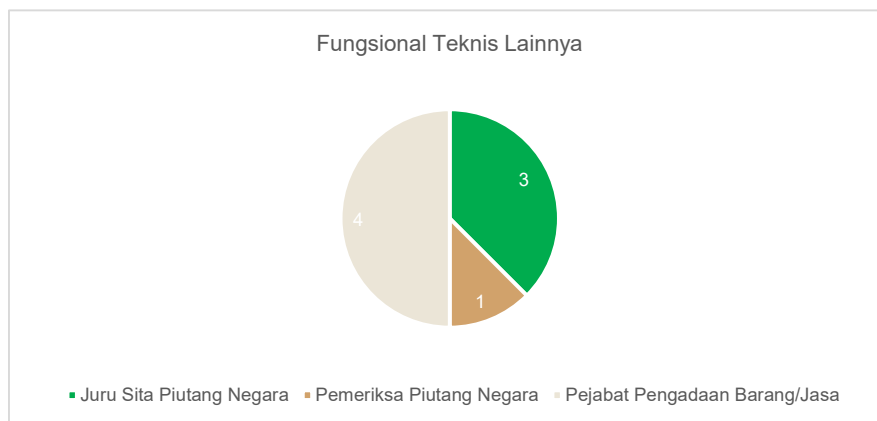
Diagram 1.3.
Komposisi Pegawai KPKNL Sidoarjo Berdasarkan Gender dan Golongan



Tabel 1.4.
Komposisi Fungsional Teknis KPKNL Sidoarjo Lainnya

No.	Fungsional Teknis Lainnya	Struktural	Pelaksana	Jumlah
1	Juru Sita Piutang Negara	2	1	3
2	Pemeriksa Piutang Negara	-	1	1
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	4	-	4

Diagram 1.4.
Komposisi Fungsional Teknis KPKNL Sidoarjo Lainnya



C. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Sidoarjo memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk:

- Optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
- Optimalisasi pendayagunaan aset-aset yang terindikasi *idle* dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi, dan hukum;
- Berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Sidoarjo senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan BMN pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan BMN, sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Sidoarjo dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik dan benar.

b. Optimalisasi Penataan Aset Menuju *Revenue Center*

PNBP menjadi alternatif dalam menyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN *idle* yang baik dan berdaya guna, KPKNL Sidoarjo sebagai Pengelola Barang dapat

mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset *idle*, sehingga paradigma *cost center* tidak dominan dan dapat bergeser ke arah *revenue center*.

c. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, piutang macet yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perbankan tidak lagi diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN. Namun demikian, pengurusan piutang negara di lingkungan KPKNL Sidoarjo tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga.

d. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Lelang juga merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sidoarjo secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya Risalah Lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dengan demikian, KPKNL Sidoarjo diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat, seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah kerjanya. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*E-Auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

e. Penilaian Kekayaan Negara

Layanan penilaian diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Pelaksanaan penilaian terhadap BMN/Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan BMN/BMD. Penilaian tersebut antara lain akan

digunakan dalam rangka penyusunan LKPP/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemanfaatan, pemindahtanganan, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan pengelolaan piutang negara/daerah. Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan piutang negara, dan pelayanan lelang yang optimal, efektif, dan efisien.

f. Memberikan Kontribusi Pemasukan PNBPN ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Sidoarjo memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengelolaan Piutang Negara, sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Sidoarjo memperoleh hasil Bea Lelang (pembeli dan/atau penjual) dan PNBPN lelang lainnya termasuk Bea Lelang Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBPN. Selain itu, secara tidak langsung dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Sidoarjo juga memberikan kontribusi cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/ penjualan BMN.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang *addendum* Perjanjian Kinerja (*jika ada*).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini terdiri dari sub bab “Capaian Kinerja Organisasi” yang menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi, sub bab “Capaian Kinerja Lainnya” yang menyampaikan capaian/inovasi yang diraih serta penghargaan yang diterima selama tahun 2025, dan sub bab “Realisasi Anggaran” yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Memuat lampiran dokumen Perjanjian Kinerja, Formulir Pengukuran Kinerja, dan dokumen-dokumen lainnya.





Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II

RENCANA KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan DJKN sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi, serta tercapainya tujuan tersebut di atas, sebagai salah satu unit vertikal DJKN, KPKNL Sidoarjo telah menetapkan sasaran strategis yang sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan DJKN sesuai Renstra Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
 - b. pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa; dan
 - c. penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah:
 - a. pengelolaan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
 - b. pengelolaan lelang yang optimal; dan
 - c. penerapan tata kelola lelang yang produktif.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah:
 - a. layanan penilaian yang *agile*, efektif, dan efisien; dan
 - b. pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
 - b. pengelolaan piutang negara yang optimal;
 - c. penerapan tata kelola piutang negara yang produktif;
 - d. pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
 - e. pengelolaan keuangan yang akuntabel;
 - f. komunikasi publik yang efektif; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Sidoarjo. Sasaran strategis KPKNL Sidoarjo telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Sidoarjo sesuai Bagan 2.1.

Peta Strategi KPKNL Sidoarjo menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 memuat 8 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa;
4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif;
5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif;
6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif;
7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif.

Bagan 2.1.

Peta Strategi KPKNL Sidoarjo Tahun 2025



Dengan 8 sasaran strategis tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala KPKNL Sidoarjo. Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU Kepala KPKNL Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Indikator Kinerja		Satuan	Target
1a-CP	Indeks integritas	Indeks (skala 100)	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja		Satuan	Target
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	%	100
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100

Sasaran Strategis 3

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Satuan	Target
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks (skala 100)	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks (skala 100)	74

Sasaran Strategis 4

Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100

Sasaran Strategis 5

Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	%	100
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	%	80

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks (skala 100)	100
6b-N	Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks (skala 100)	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80

Sasaran Strategis 7

Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks (skala 100)	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks (skala 100)	80

Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks (skala 100)	80

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Sidoarjo berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum 120 dan angka minimum 0.
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU.
3. Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU.
4. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
5. Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).
 - 3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta*, dan IKU *non cascading* dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- 5 Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), maka penghitungan indeks capaian IKU menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian IKU yang diakui 0.

Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi. Skala konversi berkenaan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Skala konversi dibuat dengan ketentuan:
 - a) Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.

- b) Realisasi terburuk merupakan realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian atau *benchmark*. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0. Skala konversi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Realisasi 0		100	Indeks Capaian
Terbaik			Indikator Kinerja
Realisasi			
Terburuk		0	

- 2) Penghitungan Indeks Capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi terburuk}} \times 100$$

- 3) Pada IKU dengan target IKU sebesar 0 tidak mungkin terdapat realisasi lebih kecil dari 0, sehingga indeks capaian maksimal IKU berkenaan 100. Penentuan konversi IKU ini menjadi 120 mengikuti ketentuan pada Indeks Capaian IKU.

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya

C_a = Capaian awal = Realisasi/Target x 100

C_n = Capaian

Capaian	Indeks Capaian
100	120
90	100
67,5	75
45	50
22,5	25
0	0

= Apabila Realisasi > Target, maka $C_a = 100 - (C_a - 100)$

= note : C_a maksimum adalah 200

Apabila Realisasi < Target, maka $C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka capaian di bawah C_n

C_{n+1} = Angka capaian di atas C_n





Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Sidoarjo tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 sebesar 118,77%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, dengan rician sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal IKU	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max.120%	Ket.
	Stakeholder Perspective (30%)					30%	33,18%		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya				33%	100%		120%	
1a-CP	Indeks integritas	P/L	100	100	19%	58%	100%	120%	Hijau
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100	132,78	14%	42%	132,78%	120%	Hijau
	Customer Perspective (20%)					20%	23,06%		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal				52%	100%		118,17%	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100	115	19%	36,54 %	115%	120%	Hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100	176,81	19%	36,54 %	176,81%	120%	Hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100	1366,94	14%	26,92 %	1366,94%	120%	Hijau
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa				28%	100%		120%	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77	93,86	14%	50%	121,89%	120%	Hijau
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	114,5	14%	50%	154,73%	120%	Hijau
	Internal Process Perspective (25%)					25%	29,44%		
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif				28%	100%		111,58%	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100	112,59	14%	50%	112,59%	120%	Hijau
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100	110,57	14%	50%	110,57%	120%	Hijau
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif				42%	100%		120%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100	135,61	14%	33,33 %	135,61%	120%	Hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70	98,12	14%	33,33 %	140,17%	120%	Hijau
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80	119,43	14%	33,33 %	149,29%	120%	Hijau
	Learning and Growth Perspective (25%)					25%	29,44%		
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif				42%	100%		120%	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggota	P/M	100	120	14%	33,33%	120%	120%	Hijau
6b-CP	Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100	120	14%	33,33%	120%	120%	Hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80	96	14%	33,33%	120,4%	120%	Hijau
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif				28%	100%		120%	

7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	122,92	14%	50%	122,92%	120%	Hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	117,33	14%	50%	146,67%	120%	Hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif				14%	100%		120%	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80	97,99	14%	100%	122,49%	120%	Hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								118,77%	Hijau

Pencapaian masing-masing sasaran strategis dan IKU KPKNL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelola kekayaan negara dan lelang dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

IKU	1a-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

IKU	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	322,82%	193,37%	193,37%	145,64%	145,64%	132,78%	132,78%	
Capaian	322,82%	193,37%	193,37%	145,64%	145,64%	132,78%	132,78%	

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi integritas selama 12 bulan ke belakang dari

pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). Komponen penilaian integritas terdiri dari internal (perdagangan pengaruh, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi, dan transparansi) dan eksternal (upaya pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai). Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian di dalamnya, maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Adapun target IKU indeks integritas KPKNL Sidoarjo pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 100 yang diperoleh dari perhitungan komponen penilaian hasil SPI (internal 45%, eksternal 45%, dan FGD 10%) dikurangi dengan komponen penilaian faktor koreksi 20% (keterjadian OTT/*fraud*, hasil audit investigasi, pengondisian, dan informasi APH) ditambah komponen apresiasi 5% (penilaian atas realisasi rencana aksi perbaikan dari hasil SPI dan penilaian atas kegiatan pencegahan di UE1).

- b. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari nominal capaian PNBPN pengelolaan BMN yang merupakan hasil penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang dikelola oleh KPKNL dan sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga (K/L) bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan ditambah PNBPN piutang negara yang merupakan nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL ditambah PNBPN lelang yang merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual, bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena

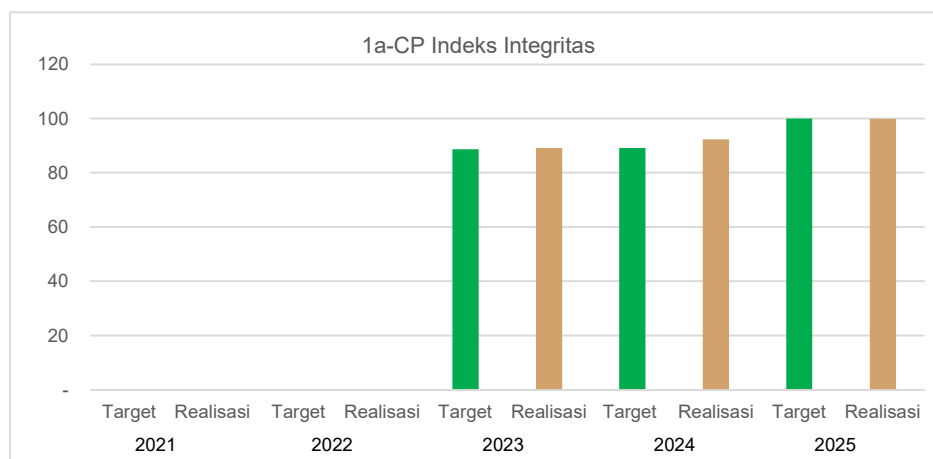
rusak/hilang, kemudian dibandingkan dengan nominal target total PNPB pengelolaan BMN ditambah PNPB piutang negara dan PNPB lelang. Adapun realisasi IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Sidoarjo tahun 2025 adalah sebesar Rp83.111.358.658,00 atau 132,78% yang diperoleh dari nominal realisasi PNPB pengelolaan BMN sebesar Rp49.421.275.980,00 ditambah PNPB piutang negara sebesar Rp64.419.363,00 dan PNPB lelang sebesar Rp33.625.663.315,00, dibandingkan dengan nominal target sebesar Rp62.592.050.000,00 yang terdiri dari nominal target PNPB pengelolaan BMN sebesar Rp45.635.000.000,00 ditambah PNPB piutang negara sebesar Rp45.050.000,00 dan PNPB lelang sebesar Rp16.912.000.000,00.

Perbandingan realisasi IKU indeks integritas dan IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

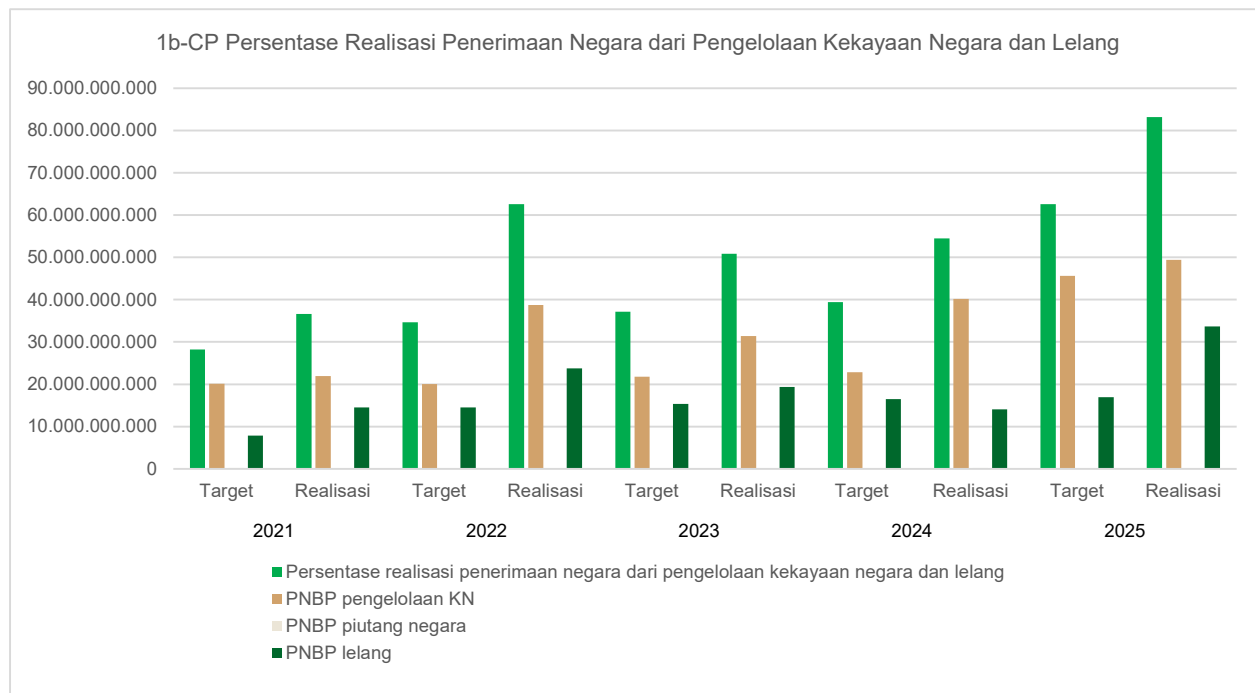
Tabel 3.2.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
1a-CP	Indeks integritas	-/-	-/-	88,67/89,17	89,17/92,44	100/100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	28.221.000.000/ 36.600.521.151	34.640.000.000/ 62.582.850.855	37.127.936.000/ 50.854.115.899	39.400.050.000/ 54.451.716.400	62.592.050.000/ 83.111.358.658
	a. PNPB pengelolaan KN	20.150.000.000/ 21.936.421.108	20.050.000.000/ 38.764.734.329	21.764.000.000/ 31.427.458.719	22.855.000.000/ 40.186.792.210	45.635.000.000/ 49.421.275.980
	b. PNPB piutang negara	220.000.000/ 132.073.217	70.000.000/ 76.755.293	45.000.000/ 76.731.642	45.050.000/ 191.863.471	45.050.000/ 64.419.363
	c. PNPB lelang	7.851.000.000/ 14.532.026.826	14.520.000.000/ 23.741.361.233	15.318.936.000/ 19.349.925.538	16.500.000.000/ 14.073.060.719	16.912.000.000/ 33.625.663.315

Grafik 3.1.



Grafik 3.2.



Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

IKU Indeks integritas						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	92	-	100
2024	89,17	92	92	92	-	89,17
2023	88,67	91,5	91,5	91	-	-
2022	-	-	91	-	-	-
2021	-	-	90,5	-	-	-

IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	100%	100%	100%	-	132,78%
2024	100%	100%	100%	100%	-	138,2%
2023	100%	100%	100%	100%	-	136,97%
2022	100%	100%	100%	100%	-	180,67%
2021	100%	100%	100%	100%	-	129,69%

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 2 IKU ini, antara lain adalah:

1. Indeks integritas

- Masih terdapat upaya pemberian gratifikasi oleh pengguna layanan kepada pejabat/pegawai KPKNL Sidoarjo, namun terhadap hal ini telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Berdasarkan pengalaman responden survei kepuasan pengguna layanan, kecepatan pelayanan lelang yang diberikan masih perlu ditingkatkan.

2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

- Untuk pencapaian PNBPN pengelolaan kekayaan negara/BMN, satuan kerja (satker) belum sepenuhnya memahami dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya pengelolaan (pemanfaatan) BMN. Banyaknya BMN *idle* yang tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Pengelola Barang.
- Untuk pencapaian PNBPN piutang negara, sebagian besar Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pembayaran utangnya dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang dapat melakukan pembayaran angsuran/pelunasan.
- Untuk pencapaian PNBPN lelang, masih cukup banyak lelang yang tidak ada peminat, terutama lelang eksekusi hak tanggungan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

1. Indeks integritas

- Menekankan kepada seluruh pejabat/pegawai untuk selalu menolak/tidak menerima terhadap upaya pemberian gratifikasi.
- Melakukan sosialisasi tentang antikorupsi, tolak gratifikasi, dan penguatan integritas, baik kepada internal kantor maupun eksternal.
- Terus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.
- Penguatan tiga lini sistem pengendalian intern, yakni Manajemen Operasional, Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindakan *fraud*.

2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
 - Melakukan bimbingan teknis pengelolaan kekayaan negara melalui sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi yang lebih ditekankan untuk pemanfaatan BMN.
 - Melakukan penggalian potensi pemanfaatan BMN pada satker K/L dan aset eks. PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA).
 - Mengoptimalkan pemantauan secara periodik maupun insidentil terkait pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN.
 - Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.
 - Memberitahukan adanya *crash program* keringanan utang tahun 2025 kepada seluruh Penanggung Utang yang memenuhi persyaratan, sehingga Penanggung Utang yang bersangkutan dapat menyelesaikan utangnya dengan mendapatkan keringanan.
 - Melakukan monitoring dan mengawal khusus Penanggung Utang yang melakukan pembayaran angsuran secara rutin.
 - Melakukan eksekusi lelang barang jaminan bagi Penanggung Utang yang utangnya didukung dengan barang jaminan.
 - Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
 - Melakukan penggalian potensi lelang kepada *stakeholder* dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
 - Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
 - Meningkatkan publikasi lelang melalui *e-Auction*, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Sidoarjo.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 2 IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.

IKU Indeks integritas				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Ketauhan Internal	9.820.000	6.840.000	- Telah dilaksanakan sosialisasi/ internalisasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai. - Telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing unit oleh Unit Ketauhan Internal. - Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Ketauhan Internal.
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi/Edukasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang	12.200.000	12.057.500	- Telah dilaksanakan 2 kali sosialisasi/edukasi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan 120 total peserta.
2.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	111.668.000	110.450.000	- Telah dihasilkan 249 SK PSP dan SK Persetujuan. - Telah dihasilkan 66 berkas pengurusan/pengelolaan piutang negara.
3.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	61.210.000	60.701.090	- Telah dihasilkan 610 Risalah Lelang.
4.	Risalah Lelang	22.976.000	20.704.000	- Telah dilaksanakan 70 kali penggalan potensi lelang.
5.	Risalah Lelang Sukarela UMKM	0	0	
6.	Penggalan Potensi Lelang	5.412.000	4.226.000	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

Sasaran Strategis 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan negara dan lelang dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 3 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.

IKU	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	141,60%	106%	106%	107,67%	107,67%	115%	115%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

IKU	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	495,05%	278,72%	278,72%	243,30%	243,30%	176,81%	178,81%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	198,30%	224,51%	224,51%	118,51%	118,51%	1366,94%	1366,94%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara diukur dari tingkat optimalisasi BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui mekanisme Penggunaan BMN dan mekanisme Pemanfaatan BMN. Adapun target tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 115% dengan rincian melalui mekanisme penggunaan sebesar 1,71, melalui mekanisme pemanfaatan sebesar 1,74, dengan Sub Komponen 1 sebesar 115% dan Sub Komponen 2 sebesar 1,00.
- Persentase realisasi pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I (JF Pelelang) dan Pegadaian dalam periode tertentu. Adapun total target pokok lelang KPKNL Sidoarjo tahun 2025 sebesar Rp482.593.645.000,00 berasal dari pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I dan pokok lelang Pegadaian. Untuk tahun 2025 ini, IKU persentase realisasi pokok lelang KPKNL Sidoarjo dapat mencapai target 120% atau sebesar Rp853.277.650.286,00 yang berasal dari pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp763.643.517.086,00 dan pokok lelang Pegadaian sebesar Rp89.634.133.200,00.
- Persentase penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) lama.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU persentase penurunan nilai saldo piutang negara, yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS), Penarikan, Pengembalian, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), Keringanan Utang, dan Koreksi Data. Adapun target IKU persentase penurunan nilai saldo piutang negara KPKNL Sidoarjo tahun 2025 adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 dan realisasi yang didapatkan sebesar Rp75.154.659.191,00 atau 1.366,94%

Perbandingan realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.6.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	-	-	-	100%/115%

Grafik 3.2.



Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	115%
2024	-	-	-	-	-	-

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah:

1. Satker belum optimal dalam penggunaan BMN-nya sesuai dengan SBSK.
2. Terdapat BMN rumah dinas yang rusak berat dan tidak dihuni atau dihuni selain pegawai (pensiunan/anak pensiunan).
3. Satker kurang kooperatif dalam pengisian form SBSK, sehingga penyerahan kembali form SBSK memakan waktu yang cukup lama.
4. Jumlah target NUP aset cukup banyak.
5. Pengelolaan BMN pada satker masih kurang mendapat perhatian lebih dari satker K/L.
6. Kurang tertibnya satker dalam melaporkan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

1. Menyusun *timeline* penugasan untuk pengukuran SBSK.
2. Melakukan koordinasi dengan satker terkait, baik secara langsung, melalui telepon maupun *WhatsApp* (WA).
3. Melakukan pemeriksaan fisik BMN secara langsung.
4. Meningkatkan pemahaman satker K/L terkait pengelolaan BMN melalui sosialisasi.
5. Melaksanakan pemantauan periodik maupun insidentil terkait wasdal BMN.
6. Mengirimkan surat kepada satker untuk input wasdal BMN pada aplikasi SIMAN.
7. Memberikan surat peringatan/imbauan kepada satker K/L.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8.

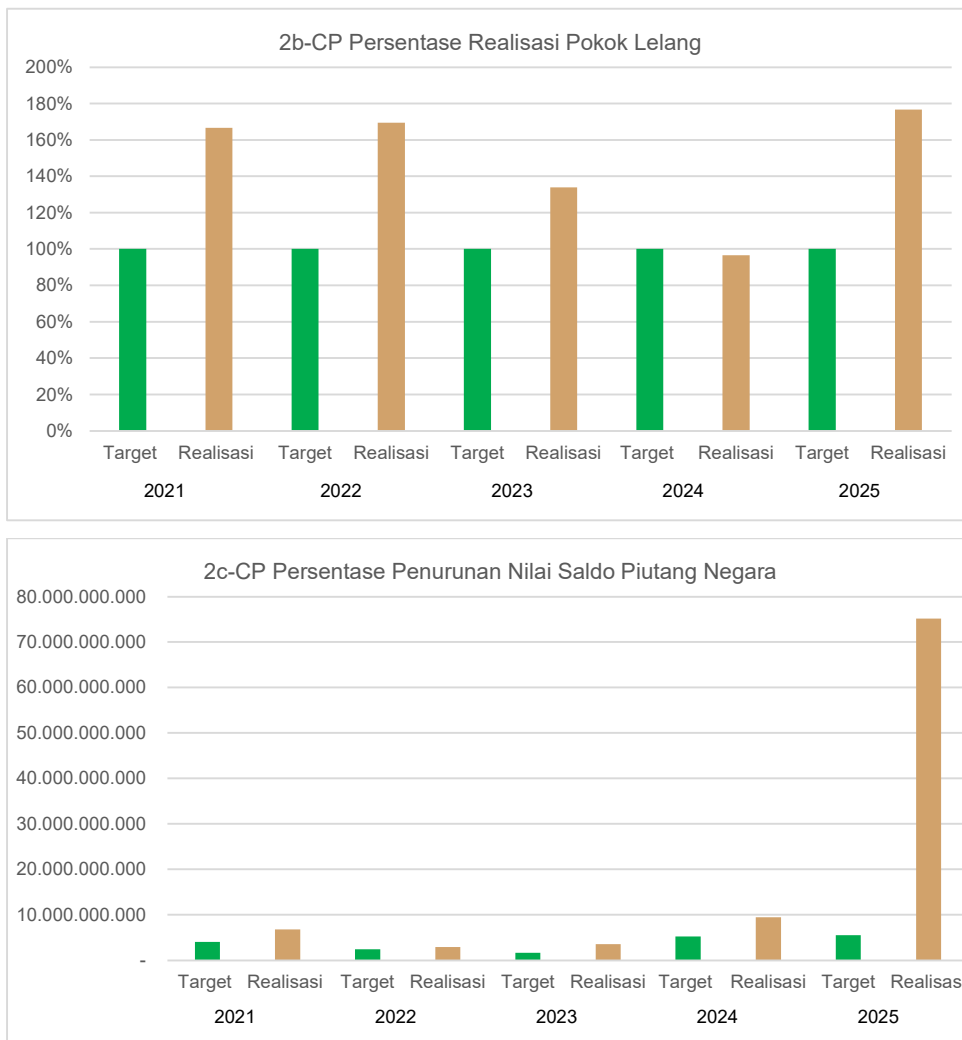
IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	0	0	-
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

Adapun perbandingan realisasi IKU persentase realisasi pokok lelang dan IKU persentase penurunan nilai saldo piutang negara dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.9.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%/166,81%	100%/169,49%	100%/133,9%	100%/96,72%	100%/176,81%
2c-CP	Persentase penurunan nilai saldo piutang negara	4.000.000.000/ 6.807.590.373	2.413.272.577/ 2.961.553.830	1.610.000.000/ 3.534.553.573	5.200.222.094/ 9.512.556.628	5.500.000.000/ 75.181.568.278

Grafik 3.3.



Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.

IKU Persentase realisasi pokok lelang						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	176,81%
2024	100%	-	100%	-	-	96,72%
2023	100%	-	100%	-	-	133,9%
2022	100%	-	100%	-	-	169,49%
2021	100%	-	100%	-	-	166,81%

IKU Persentase penurunan nilai saldo piutang negara						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	-	1366,94%
2023	100%	-	-	-	-	182,93%
2022	100%	-	-	-	-	219,54%
2021	100%	-	-	-	-	122,72%
2020	100%	-	-	-	-	170%

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 2 IKU ini, antara lain adalah:

1. Persentase realisasi pokok lelang
 - Sebagian besar lelang eksekusi hak tanggungan tidak ada peminat, terutama lelang dengan nilai limit tinggi.
 - Adanya beberapa pembatalan lelang oleh penjual dikarenakan pelunasan atau restrukturisasi.
 - Dampak pandemi Covid-19 masih menyebabkan berkurangnya minat pembeli lelang.
2. Persentase penurunan nilai saldo piutang negara
 - Sebagian besar Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pembayaran utangnya dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran angsuran/pelunasan.
 - Sebagian besar piutang negara yang dilakukan pengurusan tidak didukung dengan barang jaminan utang.
 - Terdapat BKPN yang tahap pengurusannya masih belum optimal.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

1. Persentase realisasi pokok lelang

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
 - Melakukan penggalan potensi lelang kepada *stakeholder* dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk UMKM).
 - Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
 - Meningkatkan publikasi lelang melalui *e-Auction*, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Sidoarjo.
2. Persentase penurunan nilai saldo piutang negara
- Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.
 - Memberitahukan adanya *crash program* keringanan utang tahun 2025 kepada seluruh Penanggung Utang yang memenuhi persyaratan, sehingga Penanggung Utang yang bersangkutan dapat menyelesaikan utangnya dengan mendapatkan keringanan.
 - Meningkatkan/mengoptimalkan tahap pengurusan piutang negara.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 2 IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12.

IKU Persentase realisasi pokok lelang				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Risalah Lelang	22.976.000	20.704.000	-Telah dihasilkan 610 Risalah Lelang. -Telah dilaksanakan 70 kali penggalan potensi lelang.
2.	Risalah Lelang Sukarela UMKM	0	0	
3.	Penggalan Potensi Lelang	5.412.000	4.226.000	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Persentase penurunan nilai saldo piutang negara				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	5.000.000	4.977.500	- Telah dilaksanakan 2 kali sosialisasi/edukasi piutang negara dengan 120 total peserta. - Telah dihasilkan 66 berkas pengurusan/pengelolaan piutang negara.
2.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	61.210.000	60.701.090	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

Sasaran Strategis 3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara dan lelang. Terhadap Sasaran Strategis Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa, KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.

IKU	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/TLK
Realisasi	93,86	94,72	94,72	94,14	94,14	93,86	93,86	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/TLK
Realisasi	120	109	109	112,67	112,67	114,5	114,5	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai IKPL ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Atas Pelayanan Publik. IKPL adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada sebuah instansi pemerintah di masa yang akan datang. Adapun target tahun 2025 sebesar 77 dan hasil penilaian survey pada KPKNL Sidoarjo didapatkan nilai sebesar 93,86.

b. Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/ sosialisasi yang dilaksanakan. IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan. Efektitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuisioner yang memuat 4 Indikator yaitu:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%);
- 2) kualitas materi (bobot 15%);
- 3) kualitas pengajar (bobot 10%); dan
- 4) kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5%).

Indeks edukasi dan komunikasi diukur dalam skala 1-100 dengan rincian:

0 = x = 20 = sangat tidak efektif;

20 < x = 40 = tidak efektif;

40 < x = 60 = kurang efektif;

60 < x = 80 = efektif;

80 < x = 100 = sangat efektif

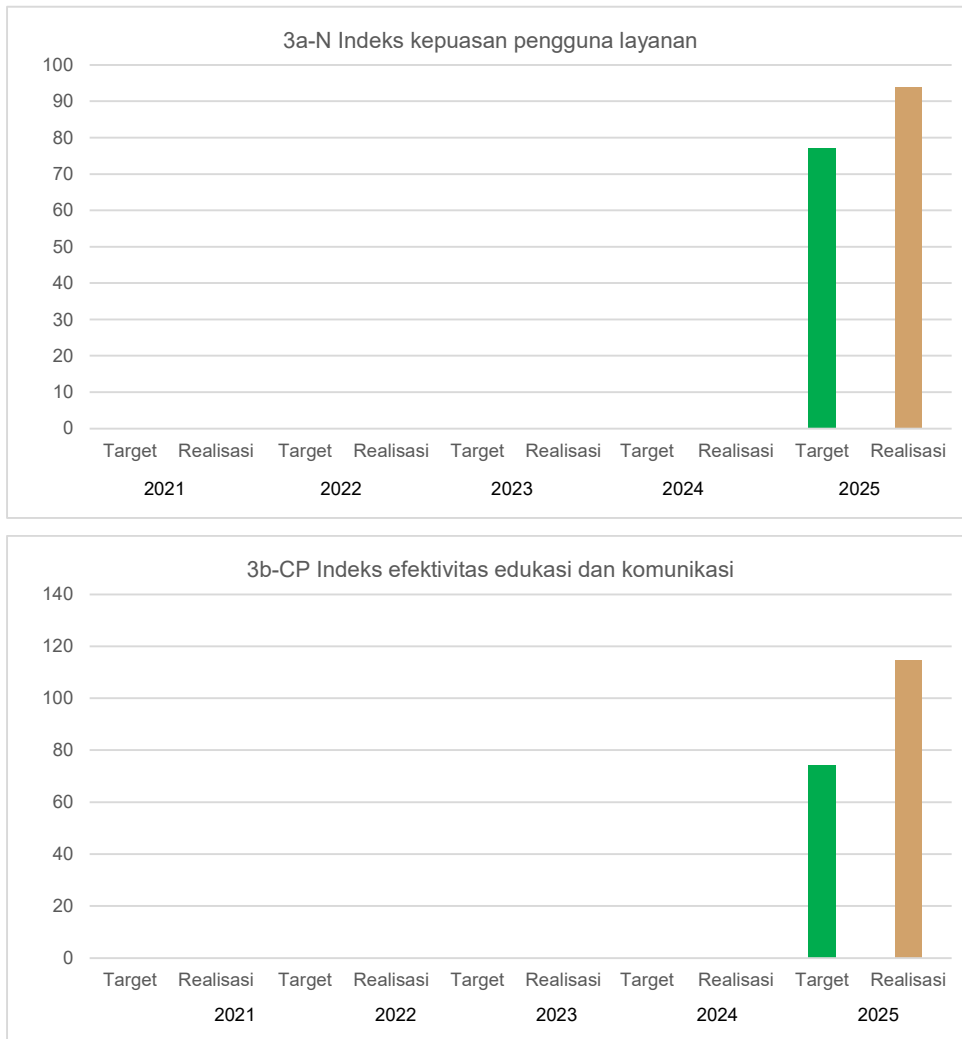
IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders terhadap ketentuan dan layanan lelang dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan. Adapun KPKNL Sidoarjo telah melakukan pengukuran terhadap efektivitas edukasi dan komunikasi Jabatan Fungsional Pelelang dan efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara. Secara keseluruhan dari target tahun 2025 sebesar 74 telah tercapai sebesar 114,5.

Adapun perbandingan realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dan IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.14.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	77/93,86
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	74/114,5

Grafik 3.4.



Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.

IKU Indeks kepuasan pengguna layanan						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	-	-	-	-	93,86
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	-	-	-	114,5
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 2 IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

IKU Indeks kepuasan pengguna layanan				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	-	-	-	- Telah dilaksanakan
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	-	-	-	- Telah dilaksanakan
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

Sasaran Strategis 4 Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola kekayaan negara yang efektif adalah tata kelola kekayaan negara yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16.

IKU	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	287,5%	140,19%	140,19%	130,98%	130,98%	112,59%	112,59%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	110%	110,38%	110,38%	116,35%	116,35%	110,57%	110,57%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”, maka sejak tahun anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus bersertipikat lainnya), dengan *output* Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), produk lainnya, atau *update* data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah). Adapun realisasi IKU persentase bidang tanah BMN yang disertipikasikan pada KPKNL Sidoarjo tahun 2025 adalah sebesar 112,59%.
- b. Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Adapun IKU persentase evaluasi kinerja BMN KPKNL Sidoarjo tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 110,57%.

Perbandingan realisasi IKU persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dan IKU persentase evaluasi kinerja BMN dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.17.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%/102,81%	100%/127,95%	100%/120,11%	100%/140,26%	100%/112,59%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%/122,22%	100%/120,42%	100%/131,44%	100%/207,27%	100%/110,57%

Grafik 3.5.



Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18.

IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	112,59%
2024	100%	-	100%	-	-	140,26%
2023	100%	-	100%	-	-	120,11%
2022	100%	-	100%	-	-	127,95%
2021	100%	-	100%	-	-	102,81%

IKU Persentase evaluasi kinerja BMN						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	110,57%
2024	100%	-	100%	-	-	207,27%
2023	100%	-	100%	-	-	131,44%
2022	100%	-	100%	-	-	120,42%
2021	100%	-	100%	-	-	122,22%

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 2 IKU ini, antara lain adalah:

1. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan
 - Proses sertifikasi berlangsung dalam beberapa tahap, di mana kendalanya ada di pihak eksternal.
 - Target tanah belum semuanya *clean* dan *clear*, bermasalah, dan batas-batasnya tidak jelas, sehingga perlu dilakukan beberapa kali penggantian target.
 - Satker kekurangan SDM, sehingga dokumen yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Kantor Pertanahan seringkali terlambat ditindaklanjuti oleh satker.
2. Persentase evaluasi kinerja BMN
 - Satker kurang transparan dalam hal informasi data biaya untuk pengukuran kelayakan finansial.
 - Beberapa *form* pendataan portofolio aset belum menyajikan nilai sewa.
 - Adanya kesulitan dalam hal pendataan pengukuran manfaat nilai sosial.
 - Badan Pusat Statistik (BPS) tidak lagi mengeluarkan data indeks mutu hidup.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

1. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

- Berkoordinasi langsung dengan Kantor Pertanahan di seluruh wilayah kerja KPKNL Sidoarjo untuk percepatan penyelesaian target.
 - Senantiasa memonitoring tahapan penerbitan sertifikat BMN pada satker pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sertipikasi BMN pada seluruh Kantor Pertanahan dan satker.
2. Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
- Sosialisasi kepada satker terkait implementasi portofolio aset.
 - Survei di lokasi satker dan melakukan wawancara dengan pengguna BMN.
 - Melakukan pendataan dan pengolahan data BMN.
 - Koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pusat untuk penyesuaian *form* portofolio aset.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 2 IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19.

IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan	124.002.000	123.591.710	Telah dilaksanakan program pensertipikatan BMN berupa tanah dengan capaian sertifikat sebanyak 903 NUP.
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Persentase evaluasi kinerja BMN				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	29.056.000	28.695.000	Evaluasi dan rekomendasi kinerja BMN sejumlah 285.
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

Sasaran Strategis 5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan

kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada *customer* atas pelayanan penilaian. *Customer* diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang piutang negara, penilaian, dan lelang KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 3 IKU yang capaiannya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20.

IKU	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	142,86%	73,56%	73,56%	279,52%	279,52%	135,61%	135,61%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Min/TLK
Realisasi	88,85%	95,13%	95,13%	97,12%	97,12%	98,12%	98,12%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	65%	62,95%	62,95%	111,7%	111,7%	119,43%	119,43%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara merupakan *output* jumlah Berkas Kasus Piutang Negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, Kementerian/Lembaga, dan Pemda. Kriteria pengakuan capaian IKU persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara berupa BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN Dikembalikan, BKPN PSBDT, BKPN Pernyataan Piutang Negara/Daerah Telah Optimal (PPN/DTO), dan Koreksi Data yang dokumennya telah di-*update* dan di-*upload* pada aplikasi FocusPN, selanjutnya dilakukan *review* oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh Kantor Pusat DJKN. Adapun persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara KPKNL Sidoarjo tahun 2025 sebesar 232,38%.
- Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penyelesaian penilaian adalah

terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Penilaian secara tepat waktu adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan. Akurasi data layanan penilaian adalah jumlah pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada aplikasi SIP dan jumlah permohonan Penilaian BMN yang diterima pada aplikasi Satu Kemenkeu atau pun SIMAN. Nilai kaji ulang adalah jumlah laporan penilaian yang mendapat nilai kaji ulang minimal 85. Adapun target IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian pada KPKNL Sidoarjo tahun 2025 adalah sebesar 70 dan realisasi yang didapatkan sebesar 98,12%.

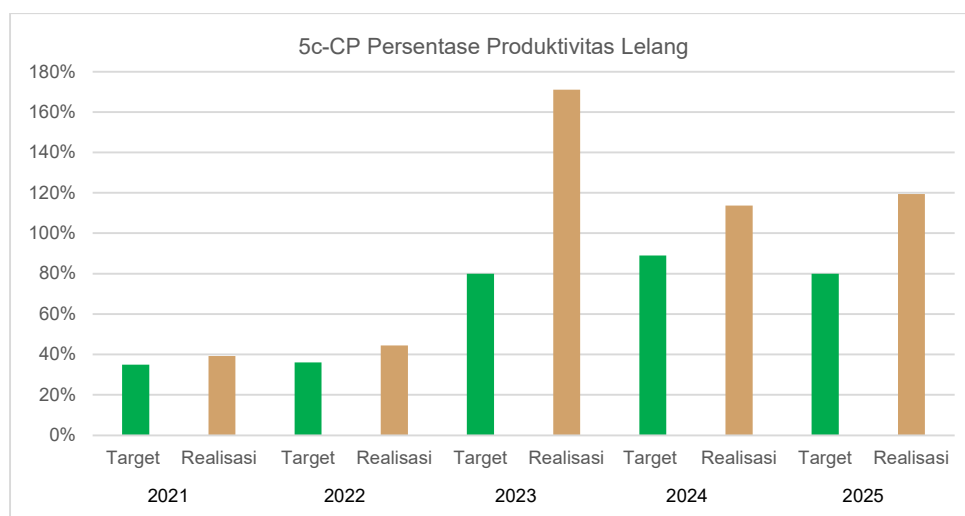
- c. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang, dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II, dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Persentase produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Adapun target persentase produktivitas lelang KPKNL Sidoarjo pada tahun 2025 adalah sebesar 80% dan realisasinya sebesar 119,43% yang diperoleh dari perhitungan rata-rata realisasi lot lelang laku dibandingkan dengan presentase frekuensi lelang.

Perbandingan realisasi IKU persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, IKU tingkat kualitas layanan penilaian, dan IKU persentase produktivitas lelang dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.21.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%/132,53%	100%/140%	100%/125%	54%/42,53%	100%/135,61%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	-	-	-	-	70%/98,12%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	35%/39,22%	36%/44,59%	80%/171,16%	89%/113,69%	80%/119,43%

Grafik 3.6.



Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22.

IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	-	135,61%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

IKU Tingkat kualitas layanan penilaian						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70%	-	-	-	-	98,12%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

IKU Persentase produktivitas lelang						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	34%	-	-	119,43%
2023	89%	-	34%	-	-	113,69%
2022	80%	-	34%	-	-	171,16%
2021	36%	-	34%	-	-	44,59%
2020	35%	-	34%	-	-	39,22%

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 3 IKU ini, antara lain adalah:

1. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara
 - Untuk pencapaian penyelesaian BKPN, sebagian besar Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pembayaran utangnya dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran angsuran/pelunasan.
 - Sebagian besar piutang negara yang dilakukan pengurusan tidak didukung dengan barang jaminan utang.

- Terdapat BKPN yang tahap pengurusannya masih belum optimal.
2. Tingkat kualitas layanan penilaian hambatannya antara lain adalah frekuensi/volume permohonan penilaian dari KPKNL lain yang cukup tinggi dan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi terkait waktu serta ketersediaan penilai dalam kurun waktu sesuai SOP, sehingga hal ini menyebabkan sering kali durasi/waktu SOP terlewat.
 3. Persentase produktivitas lelang
 - Sebagian besar lelang eksekusi hak tanggungan tidak ada peminat, terutama lelang dengan nilai limit tinggi.
 - Adanya beberapa pembatalan lelang oleh penjual dikarenakan pelunasan atau restrukturisasi.
 - Dampak pandemi Covid-19 masih menyebabkan berkurangnya minat pembeli lelang.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

1. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara
 - Melakukan penagihan langsung/melalui surat dan penelitian lapangan, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang.
 - Melaksanakan *joint collection* (penagihan bersama) dan melibatkan peran serta Penyerah Piutang untuk menagih piutang ke Penanggung Utang.
 - Memberitahukan adanya *crash program* keringanan utang tahun 2025 kepada seluruh Penanggung Utang yang memenuhi persyaratan, sehingga Penanggung Utang yang bersangkutan dapat menyelesaikan utangnya dengan mendapatkan keringanan.
 - Meningkatkan/mengoptimalkan tahap pengurusan piutang negara.
2. Tingkat kualitas layanan penilaian

Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* internal dan telah menyampaikan hal ini kepada Kantor Wilayah agar lebih berperan dalam membangun komunikasi, sehingga layanan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
3. Persentase produktivitas lelang
 - Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.

- Melakukan penggalan potensi lelang kepada *stakeholder* dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk UMKM).
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui *e-Auction*, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Sidoarjo.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 3 IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23.

IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	5.000.000	4.977.500	- Telah dilaksanakan 2 kali sosialisasi/edukasi piutang negara dengan 120 total peserta. - Telah dihasilkan 66 berkas pengurusan/pengelolaan piutang negara.
2.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	61.210.000	60.701.090	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Tingkat kualitas layanan penilaian				
No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Penilaian	16.284.000	16.010.000	- Telah disusun Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan Daftar Komponen Penilaian Sewa. - Telah dihasilkan 249 SK PSP dan SK Persetujuan.
2.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	111.668.000	110.450.000	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Persentase produktivitas lelang				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	0	0	- Telah dilaksanakan 2 kali sosialisasi/edukasi di bidang lelang dengan total 120 peserta. - Telah dihasilkan 610 Risalah Lelang. - Telah dilaksanakan 70 kali penggalan potensi lelang.
2.	Risalah Lelang	22.976.000	20.704.000	
3.	Risalah Lelang Sukarela UMKM	0	0	
4.	Penggalian Potensi Lelang	5.412.000	4.226.000	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

Sasaran Strategis 6 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dilaksanakan dengan cara mengelola dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat tercermin dari minimnya deviasi data-data keuangan terkait, misalnya data PNBPN fungsional DJKN. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif juga diharapkan mampu menjadi penompang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 3 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24.

IKU	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	6b-N Indeks tata kelola barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/Ave
Realisasi	119,67	111,43	111,43	103	103	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/Ave
Realisasi	30%	62%	62%	75%	75%	96%	96%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SMART DJA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Perhitungan IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PER-5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, di mana untuk Q1, Q2, dan Q3 = $100\% \times \text{IKPA}$ dan Q4 = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$. Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:
 - i. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap);
 - ii. Deviasi halaman III DIPA adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai lembar ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus);
 - iii. Penyerapan anggaran atas pagu *netto* adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self-blocking*, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017);
 - iv. Belanja kontraktual, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN;

- v. Penyelesaian tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS non belanja pegawai;
 - vi. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh *record* GUP;
 - vii. Capaian *output*, dihitung dari *output* dan volume *output* dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan capaian keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian indikator kinerja *output* (*value for money*); dan
 - viii. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.
- b. Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2025 berfokus pada proses pemanfaatan aplikasi BMN (e-Sewa), pemanfaatan aplikasi pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan dalam negeri. IKU tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan diukur dari 3 komponen, yakni pemanfaatan aplikasi BMN (e-Sewa BMN) oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian keuangan, ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan dan monitoring indeks tata kelola pengadaan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Adapun target IKU tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan KPKNL Sidoarjo tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 dan realisasi indeks yang didapatkan juga sebesar 100.
- c. IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai mengukur 2 komponen, yaitu kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan dan kualitas pemenuhan standar jam pelatihan (JP) bagi pegawai. Program kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 bidang bintal, yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, dan bidang kejiwaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Kualitas pemenuhan standar JP bagi pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan

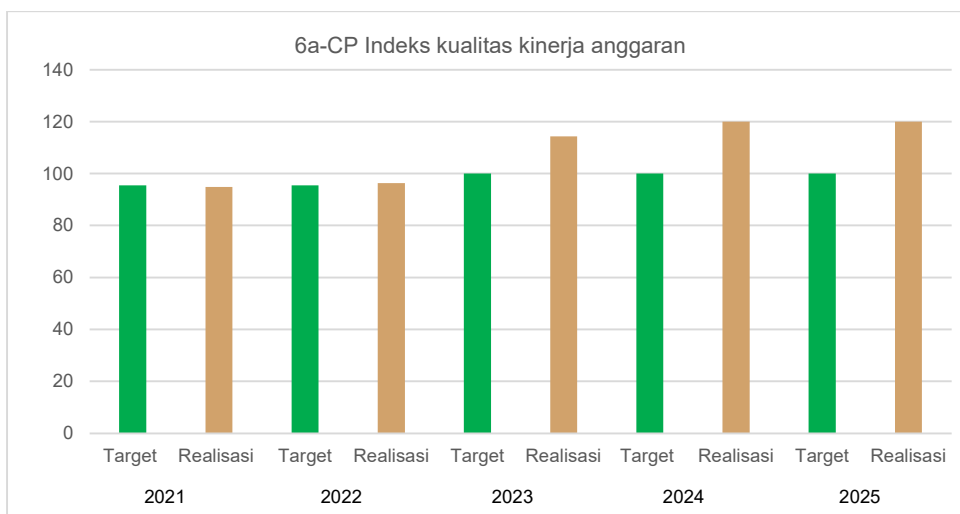
pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana pengembangan kompetensi pada modul Dialog Kinerja Individu (DKI) telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada peraturan terkait pengembangan kompetensi pegawai tercantum dalam PMK 216 tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun realisasi IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai KPKNL Sidoarjo tahun 2025 telah tercapai sebesar 96%, didapatkan dari komponen kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan sebesar 118% dan kualitas pemenuhan standar JP bagi pegawai sebesar 120%.

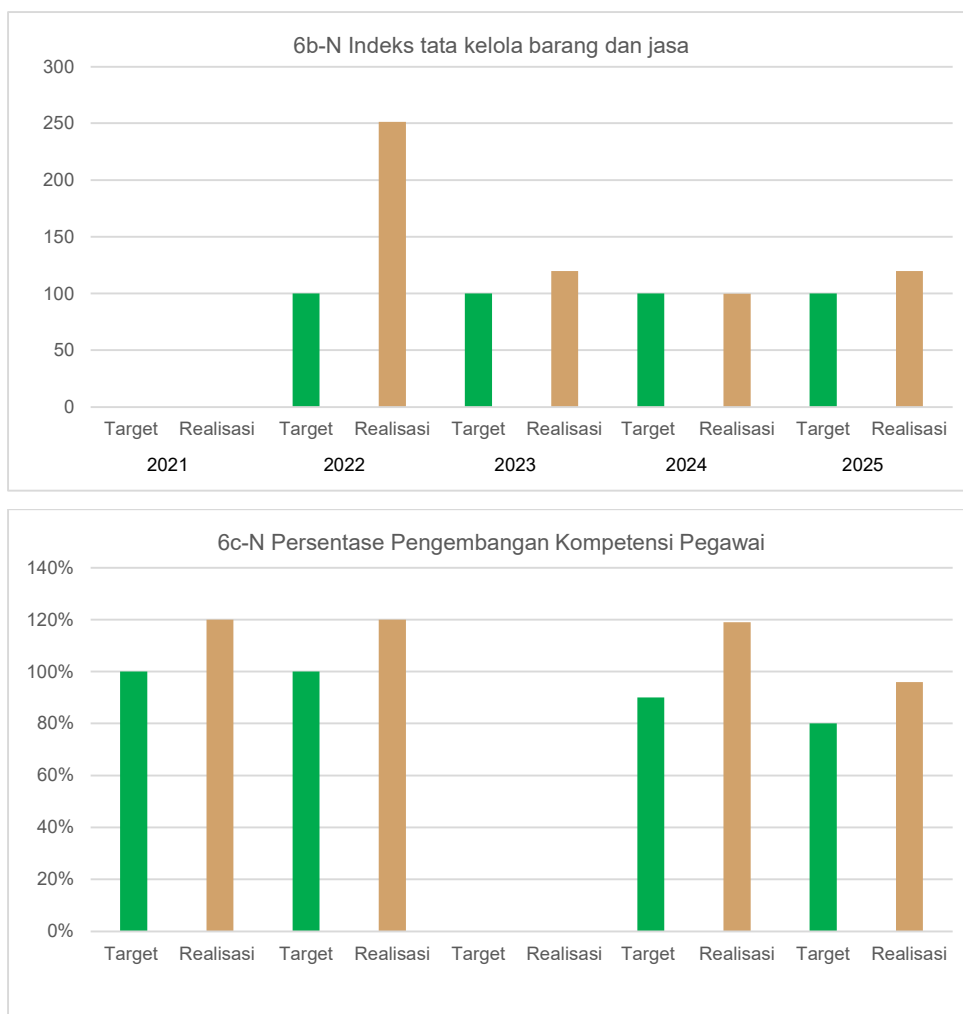
Perbandingan realisasi IKU Indeks kualitas kinerja anggaran, IKU Indeks tata kelola barang dan jasa, dan IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.25.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	95,5/94,94	95,5/96,41	100/114,4	100/120	100/120
6b-N	Indeks tata kelola barang dan jasa	-/-	100%/251,5%	100%/120%	100/100	100/120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%/120%	100%/120%	-/-	90%/119%	80%/96%

Grafik 3.7.





Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26.

IKU Indeks kualitas kinerja anggaran						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	95	95	95	-	120
2024	100	95	95	95	-	120
2023	100	95	95	95	-	114,4
2022	95,5	95	95	95	-	96,41
2021	95,5	95	95	95	-	94,94

IKU Indeks tata kelola barang dan jasa						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	100	-	-	-	-	100
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	251,5
2021	-	-	-	-	-	-

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	-	-	-	96%
2023	90%	-	-	-	-	119%
2022	-	-	-	-	-	-
2021	100%	-	-	-	-	120%
2020	100%	-	-	-	-	120%

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 3 IKU ini, antara lain adalah:

1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
 - Terdapat perubahan formula perhitungan IKPA.
 - Masih kurangnya konsistensi Rencana Pencairan Dana (RPD) dengan realisasi RPD.
 - Adanya arahan untuk melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas di triwulan IV.
2. Indeks tata kelola barang dan jasa

Untuk pencapaian tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan relatif tidak menemui hambatan.
3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Terdapat gap antara kebutuhan kompetensi dengan *hard competency* yang dimiliki masing-masing pegawai.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
 - Menyusun RPD yang akurat dan disesuaikan dengan rencana;
 - Konsisten dalam melaksanakan RPD.
 - Melakukan pemilihan skala prioritas terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun, dengan tetap memperhatikan capaian *output* terkait.

- Selalu monitoring dan memastikan indikator capaian IKPA dan SMART DJA terpenuhi.
 - Memperhatikan hal yang mempengaruhi nilai indikator capaian IKPA dan SMART DJA.
 - Melaksanakan penganggaran dengan *pruden*.
2. Tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan
Melaksanakan pengelolaan BMN dan pengadaan sesuai dengan yang direncanakan dan secara seksama.
3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
- Mengusulkan para pegawai untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan kompetensinya.
 - Menghimbau para pegawai untuk mengikuti *e-learning* melalui *Kemenkeu Learning Centre* (KLC).
 - Melakukan kegiatan berbagi ilmu sesuai jadwal yang ditentukan.
 - Memonitor *hard competency* dan program pengembangan kompetensi para pegawai.
 - Berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJKN terkait pelaksanaan diklat yang dapat diikuti.
 - Secara berkala melaksanakan program/kegiatan kebintalan.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 3 IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27.

IKU Indeks kualitas kinerja anggaran				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Belanja Barang	3.296.030.000	3.187.096.257	- Telah dilakukan pemilihan skala prioritas terhadap kegiatan yang dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan capaian <i>output</i> terkait. - Telah dilakukan monitoring dan memastikan indikator capaian IKPA dan SMART DJA terpenuhi. - Telah dilaksanakan penganggaran dengan <i>pruden</i> .
2.	Belanja Modal	162.003.000	157.817.500	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Indeks tata kelola barang dan jasa				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Layanan Perkantoran	2.400.962.000	2.356.149.756	- Telah dilaksanakan pengelolaan BMN dan pengadaan sesuai dengan rencana.
2.	Peralatan Fasilitas Perkantoran	106.003.000	102.817.500	

3.	Kendaraan Bermotor	56.000.000	55.000.000	- Telah dilaksanakan monitoring indeks tata kelola pengadaan yang tepat waktu. - Telah ditingkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). - Telah dimanfaatkannya aplikasi pengadaan.
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	-	-	-	-
Kegiatan dalam IKU ini tidak menggunakan alokasi anggaran KPKNL Sidoarjo, baik untuk program/kegiatan kebhintalan maupun pemenuhan standar jam pelatihan (JP) bagi pegawai. Anggaran yang digunakan untuk program/kegiatan pemenuhan standar JP bagi pegawai menggunakan anggaran Sekretariat DJKN dan/atau Pusdiklat masing-masing penyelenggara diklat.				

Sasaran Setrategis 7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan (dengan bobot 80%) dan indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap (dengan bobot 20%). Sedangkan untuk komunikasi publik yang efektif yaitu dilakukan penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk komunikasi publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan informasi/data bagi masyarakat umum mengenai Kementerian Keuangan sangatlah penting. Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan sesuai dengan *service level agreement* yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38.

IKU	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/Ave
Realisasi	115,92	114,47	114,47	113,77	113,77	122,92	122,92	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Ave
Realisasi	118	117,58	117,58	117,11	117,11	117,33	117,33	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

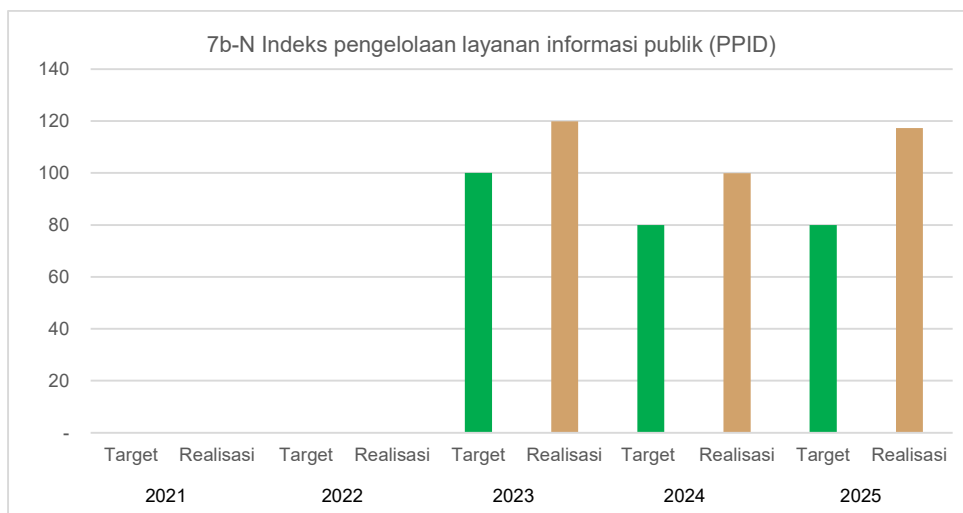
Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat Secara Berkala pada masing-masing *website* untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Perhitungan IKU indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) terdiri dari 3 komponen, yaitu: 1) ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan bobot 60%; 2) ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik bobot 20%; dan 3) penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada *website* bobot 20%. Adapun target IKU indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) KPKNL Sidoarjo tahun 2025 adalah 80 dan untuk realisasi penyelesaiannya adalah 117,33%.

Perbandingan realisasi dari kedua IKU tersebut dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.39.

Indikator Kinerja		2020 Target/Realisasi	2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	-/-	-/-	-/-	-/-	100/122,92
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	-/-	-/-	100/120	80/100	80/117,33

Grafik 3.8.



Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40.

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	122,92
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	117,33
2024	80	-	-	-	-	100
2023	100	-	-	-	-	120
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini adalah relatif tidak menemui hambatan, dikarenakan tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi melalui mekanisme PPID.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

- Memberikan edukasi melalui infografis terkait dengan prosedur, alur, maupun persyaratan permohonan informasi publik dengan menggunakan papan informasi yang ada di Area Pelayanan Terpadu (APT), *standing banner*, *website* kantor, maupun media sosial kantor agar dapat diketahui oleh seluruh *stakeholder*.
- Terkait dengan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada seluruh pemohon informasi, maka jika terdapat permohonan informasi melalui mekanisme PPID, akan diberikan pemahaman di awal kepada pemohon informasi bahwa terdapat klasifikasi informasi publik yang dapat diberikan dan juga yang dikecualikan, guna mengurangi rasa kecewa pemohon informasi jika informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.41.

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Penanganan Perkara	57.240.000	56.210.000	- Telah dilaksanakan
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)				
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Kehumasan	8.304.000	4.475.000	- Telah dilaksanakan pengelolaan layanan informasi publik (PPID) KPKNL Sidoarjo sesuai dengan norma waktu dan ketentuan yang berlaku.
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.				

Sasaran Strategis 8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah adalah upaya mewujudkan penguatan dan peningkatan kualitas UKI DJKN dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas yang memadai. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Sidoarjo mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42.

IKU	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	97,69	97,69	97,99	97,99	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Uraian capaian untuk IKU tersebut adalah sebagai berikut:

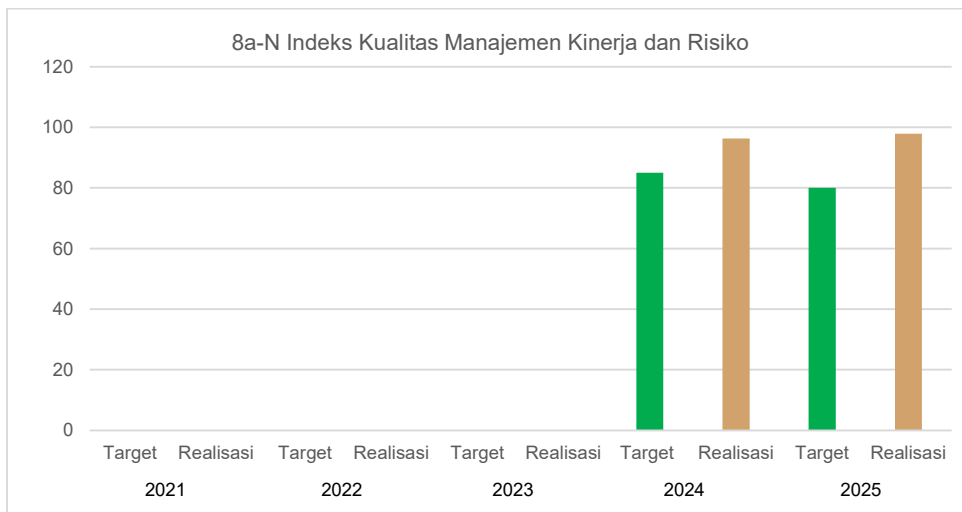
- Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di

Lingkungan Kementerian Keuangan, telah memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko diperoleh dari penjumlahan nilai reviu pengelolaan kinerja organisasi sebesar 30%, nilai reviu pengelolaan kinerja pegawai sebesar 30%, dan indeks kualitas manajemen risiko sebesar 40%. Adapun target IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko KPKNL Sidoarjo tahun 2025 ditetapkan sebesar 80 dan realisasi indeks yang didapatkan sebesar 97,99 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43.

Indikator Kinerja		2021 Target/Realisasi	2022 Target/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	-/-	-/-	-/-	85/96,33	80/97,99

Grafik 3.8.



Adapun perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko						
TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	97,99
2024	85	-	-	-	-	96,33
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Adapun langkah-langkah guna mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah:

1. Terus meningkatkan produktifitas lelang agar target realisasi pokok lelang dapat tercapai di tahun 2026.
2. Terus memantau perkembangan pencapaian target realisasi pokok lelang maupun target kinerja lainnya, sehingga di akhir periode seluruh target kinerja dapat tercapai.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.45.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko					
No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan	
1.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	9.820.000	6.840.000	- Telah dilaksanakan sosialisasi/ internalisasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai. - Telah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing unit oleh Unit Kepatuhan Internal. - Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal.	
Adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.					

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Dalam rangka mempertahankan prestasi dan capaian yang telah diraih, KPKNL Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Adapun prestasi dan capaian yang telah diraih KPKNL Sidoarjo selama tahun 2023 - 2025, antara lain adalah:

1. Pengembangan Inovasi KPKNL Sidoarjo

Dalam upaya pembangunan ZI-WBBM di tahun 2023 - 2025, KPKNL Sidoarjo telah mengembangkan beberapa inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjawab ekspektasi pengguna layanan, baik internal maupun eksternal, serta masyarakat luas. Adapun inovasi-inovasi tersebut berupa:

- a. **Layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu**, merupakan salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan lelang. Sebagai sebuah inovasi, layanan ini merupakan bentuk kemudahan pengurusan sebelum pelaksanaan lelang untuk SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan setelah pelaksanaan lelang untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Melalui layanan ini, KPKNL Sidoarjo ingin mempersembahkan citra pelaksanaan lelang yang cepat, transparan, akuntabel dan profesional.
- b. **Lacak Debitur**, merupakan inovasi dalam penelusuran/pelacakan (*tracking*) Penanggung Utang (Debitur) dalam proses pengurusan/penagihan piutang negara/daerah, yang merupakan tugas utama dari seorang pemegang BKPN, Jurusita atau Pemeriksa Piutang Negara. Dengan menggunakan inovasi ini, maka keberadaan Debitur akan dapat diketahui secara valid, di mana hal ini juga akan menentukan kesuksesan atau keberhasilan dalam penagihan piutang negara/daerah yang memberikan kontribusi untuk Kas Negara/Daerah.
- c. **Pantau Capkin (Capaian Kinerja)**, merupakan inovasi yang memberikan kemudahan dalam *updating* data capaian kinerja setiap minggunya. Dalam aplikasinya, inovasi ini menggunakan fasilitas dari *google spreadsheet* yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui inovasi sederhana ini, KPKNL Sidoarjo ingin memberikan percepatan pemberian informasi dan juga pemenuhan permintaan pimpinan terkait validasi dan akselerasi penyampaian data capaian kinerja. Selain itu, inovasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan manajemen risiko pada UPR (Unit Pengendali Risiko) KPKNL Sidoarjo dalam rangka memitigasi risiko gagalnya pencapaian target kinerja KPKNL Sidoarjo.
- d. **Layanan Area Pelayanan Terpadu (APT) Digital**, merupakan inovasi berupa link sederhana yang ditawarkan kepada para *stakeholders* dan masyarakat pengguna layanan. Link ini merupakan alat bantu dalam memudahkan kunjungan tamu di KPKNL Sidoarjo. Dengan mengakses link yang tersedia, para

- pengguna layanan mendapatkan layanan antara lain berupa Buku Tamu Digital, Survei Kepuasan Digital, Layanan Pengaduan Masyarakat, Tutorial Layanan di Bidang dan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Lelang, dan Penilaian, serta Penelusuran Permohonan *Stakeholders*, dan sebagainya.
- e. **Kawal IP (Integritas dan Program)**, merupakan inovasi berbentuk rapat koordinasi dan internalisasi dua pekanan, dalam rangka mengawal integritas pegawai dan program kerja dua pekanan. Forum ini sebagai sarana yang disediakan untuk pimpinan agar dapat melakukan evaluasi kepada para bawahannya secara langsung dan periodik berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan jo. KMK 300/KMK.01/2022.
 - f. **Obrolan Seputar Tusi (OBSESI)**, merupakan inovasi berupa obrolan ringan pejabat/pegawai dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi terkait tugas dan fungsi serta pengetahuan umum lainnya. Melalui OBSESI ini, diharapkan *soft competency* pegawai dapat terpenuhi di luar dari *mandatory* maupun acara *sharing sesion* eksternal lainnya.
 - g. **Sidak Plus**, merupakan inovasi dalam bentuk pemantauan dan penegakan integritas dan etika yang dilaksanakan oleh UKI KPKNL Sidoarjo kepada seluruh pejabat/pegawai. Adapun bentuk pemantauan dan penegakan yang dilakukan, antara lain adalah pemantauan kehadiran pegawai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (sidak) dengan nilai *plus* di antaranya mengecek laci/meja pegawai.
 - h. **Informasi Data Pengurusan Piutang Negara (SITARUS)**, merupakan inovasi yang ditujukan untuk menjembatani dan memudahkan Penyerah Piutang untuk secara *update* memonitor perkembangan tahap pengurusan dan pembayaran piutang negara/daerah oleh Debitur melalui link *online* yang telah disediakan.
 - i. **Buku Saku Digital Kode Etik Pegawai**, merupakan alat bantu yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta memudahkan para pegawai dalam mempelajari kode etik pegawai. Dengan inovasi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah dapat mempersembahkan pelayanan yang informatif, transparan, akuntabel dan profesional.
 - j. **Gerakan Disiplin Keren (GDK)**, merupakan gerakan kebersamaan dan kekompakan untuk bertindak disiplin sesuai dengan nilai Budaya Organisasi Kemenkeu, yaitu dua menit sebelum jadwal: melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan seluruh pegawai dengan hadir di ruang/tempat

rapat 2 (dua) menit sebelum rapat di mulai sesuai jadwal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat.

- k. **Sehat Segar Ceria (SSC)**, merupakan kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan kesegaran secara jasmani dan rohani dalam meningkatkan semangat dan kinerja SDM sebagai aset utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada pengguna layanan.
- l. **Percepatan Janji Layanan KPKNL Sidoarjo**, merupakan inovasi percepatan janji layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan dengan lebih mempercepat norma waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Adapun beberapa inovasi percepatan janji layanan tersebut adalah:
 - **Percepatan Penerbitan Kutipan Risalah Lelang**, SOP 1 hari kerja dan percepatan yang diberikan adalah pada hari yang sama (*same day service*).
 - **Percepatan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang**, SOP 1 hari kerja dan percepatan yang diberikan adalah pada hari yang sama (*same day service*).
 - **Percepatan Layanan Penilaian Properti dalam Rangka Pemindahtanganan**, dari norma waktu yang ditetapkan, KPKNL Sidoarjo memberikan percepatan 2 hari kerja sebelumnya, dari yang SOP-nya 33 hari kerja menjadi 31 hari kerja, dari yang 35 hari kerja menjadi 33 hari kerja, dan dari yang 37 hari kerja menjadi 35 hari kerja.
 - **Percepatan Layanan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan**, SOP 5 hari kerja dan percepatan yang diberikan adalah maksimal 3 hari kerja.
 - **Percepatan Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)**, SOP 1 hari kerja dan percepatan yang diberikan adalah pada hari yang sama (*same day service*).
 - **Percepatan Layanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan**, SOP 7 hari kerja dan percepatan yang diberikan adalah maksimal 5 hari kerja.
 - **Percepatan Penyetoran Hasil Bersih Lelang ke Penjual**, SOP 3 hari kerja dan percepatan yang diberikan adalah maksimal 2 hari kerja.

3. Replikasi Inovasi oleh Satuan Kerja Lain

Terhadap inovasi-inovasi tersebut di atas, terdapat satu inovasi yaitu **Lacak Debitur** yang mulai tahun 2023 sampai dengan sekarang telah direplikasi dan digunakan

oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai tujuan KPKNL Sidoarjo dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPKNL Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 membutuhkan dana sebesar Rp3.344.913.757,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai *output* kegiatan, komponen yang diperhitungkan hanya Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun secara terperinci realisasi per jenis belanja KPKNL Sidoarjo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46.
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

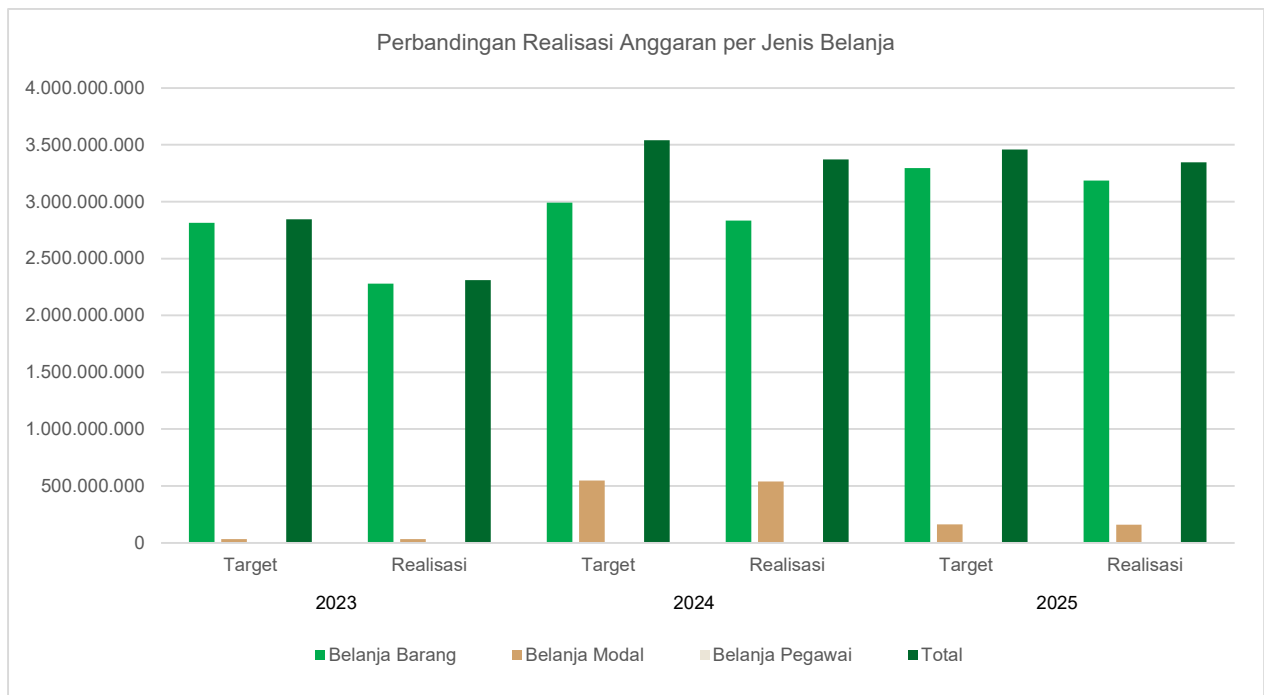
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Barang	3.296.030.000	3.187.096.257	96,70%
Belanja Modal	162.003.000	157.817.500	97,42%
Belanja Pegawai	-	-	-
Total	3.458.033.000	3.344.913.757	96,73%

Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja dari tahun 2023 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.47.
Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	2023			2024			2025		
	Pagu	Realisasi	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Barang	2.813.305.000	2.277.920.001	80,97%	2.992.220.000	2.832.611.776	94,67%	3.296.030.000	3.187.096.257	96,70%
Belanja Modal	31.498.000	30.800.000	97,78%	547.715.000	537.750.660	98,18%	162.003.000	157.817.500	97,42%
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.844.803.000	2.308.720.001	81,16%	3.539.935.000	3.370.362.436	95,21%	3.458.033.000	3.344.913.757	96,73%

Grafik 3.9.
Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja





Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



04.

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Sidoarjo tahun 2025 merupakan penjabaran dari capaian kinerja organisasi KPKNL Sidoarjo yang terdiri dari 8 sasaran strategis, yaitu: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (3) Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa; (4) Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif; (5) Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif; (6) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif; (7) Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif; dan (8) Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif. Target IKU KPKNL Sidoarjo Tahun 2025 hampir secara keseluruhan telah tercapai, dengan capaian NKO sebesar 118,77%.

Adapun langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kinerja antara lain adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara yang lebih optimal, penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel, serta pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan melakukan penagihan dan penggalan potensi penyerahan piutang negara.
3. Membangun dan mengembangkan database penilaian yang andal serta meningkatkan kualitas penilai dan/atau tenaga di bidang penilaian.
4. Meningkatkan layanan lelang baik kepada pemohon lelang maupun peserta lelang, sehingga minat untuk melakukan penjualan dan pembelian melalui lelang dapat meningkat.
5. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan mitigasi risiko terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan penanganan perkara dan permasalahan hukum dengan optimal, sehingga perkara dan permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
7. Menyelesaikan seluruh layanan dengan lebih cepat dan tepat.
8. Melaksanakan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

9. Mempertahankan predikat menuju WBK Tahun 2021 dan WBBM Tahun 2025 dengan senantiasa meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan *core values* ASN BerAKHLAK.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Sidoarjo Tahun 2025;
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sidoarjo Tahun 2025;
3. Piagam Penghargaan Predikat Menuju WBBM Tahun 2025;
4. Proposal Inovasi KPKNL Sidoarjo; dan
5. Bukti Replikasi Inovasi KPKNL Sidoarjo oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.





Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.



LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Sidoarjo Tahun 2025



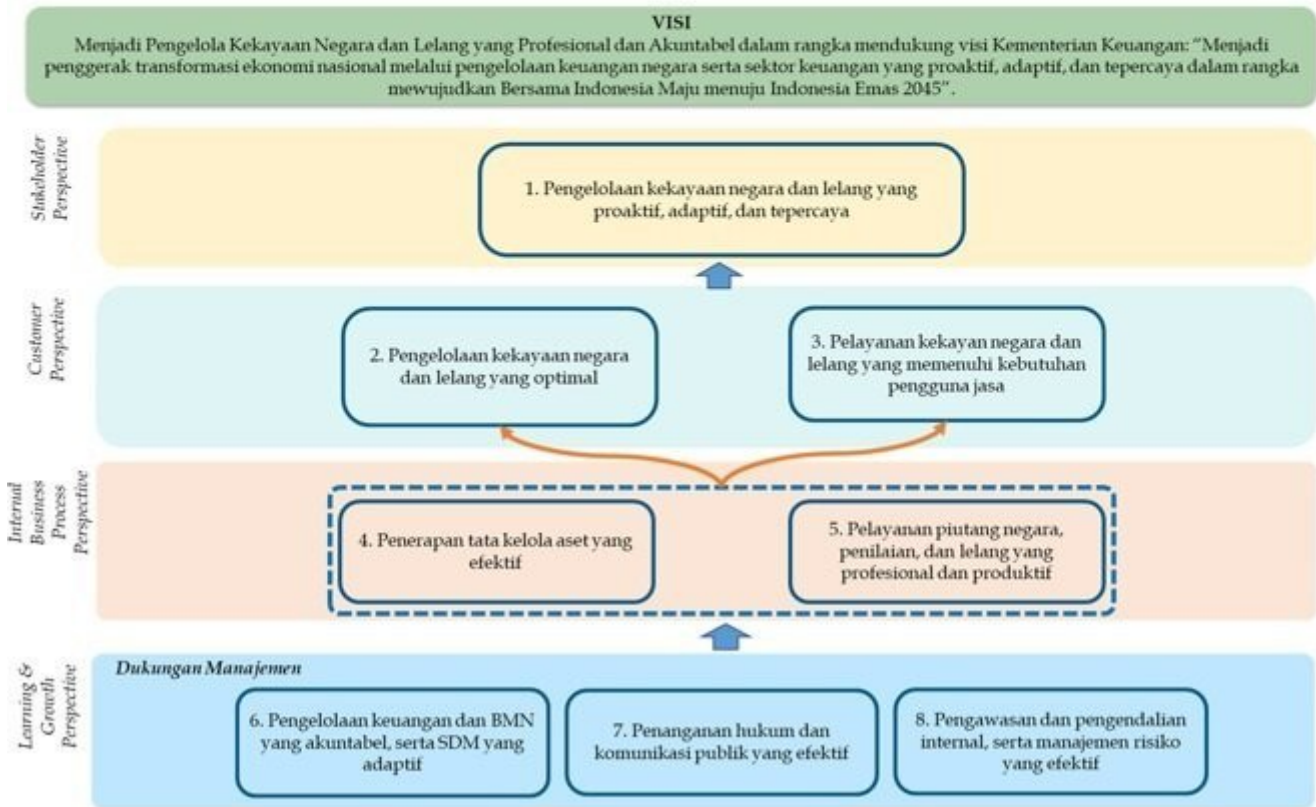
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.10/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SIDOARJO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
- 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
- 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SIDOARJO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp62,59 Milyar)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp415,145 Milyar)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp5,5 Milyar)
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Anggaran



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp776,775,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	Rp23,780,000
2. Pengelolaan Aset	Rp752,995,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp8,064,896,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp57,240,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp7,931,976,000
3. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp53,616,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp22,064,000

SIDOARJO, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Timur



Ditandatangani Secara Elektronik
Dudung Rudi Hendratna

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Sidoarjo



Ditandatangani Secara Elektronik
Untung Sudarwanto



RINCIAN TARGET KINERJA

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

SIDOARJO

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp62,59 Milyar)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp415,145 Milyar)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,5 Milyar)
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	10%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

SIDOARJO, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo



Ditandatangani Secara Elektronik
Untung Sudarwanto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

SIDOARJO, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo



Ditandatangani Secara Elektronik
Untung Sudarwanto



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Untung Sudarwanto		NAMA	Dudung Rudi Hendratna
NIP	19730227 199903 1 001		NIP	19700622 199103 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp62,59 Milyar)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp415,145 Milyar)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp5,5 Milyar)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



SIDOARJO, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna
19700622 199103 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Untung Sudarwanto
19730227 199903 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	35 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp62,59 Milyar)
	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp415,14 5 Milyar)
	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,5 Milyar)
	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	10%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
KONSEKUENSI								
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							



SIDOARJO, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna
19700622 199103 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Untung Sudarwanto
19730227 199903 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN 2

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sidoarjo Tahun 2025

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL Sidoarjo
Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	Bobot IKU	Bobot Tertimban g IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-								111,53	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,29	19,00%	57,58%	105,29	105,29	60,62	111,53
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	132,78%	14,00%	42,42%	132,78	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								118,17	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	115,00%	19,00%	36,54%	115,00	115,00	42,02	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	176,81%	19,00%	36,54%	176,81	120,00	43,85	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	1366,94%	14,00%	26,92%	1.366,94	120,00	32,31	119,09
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	93,86	14,00%	50,00%	121,89	120,00	60,00	
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	114,50	14,00%	50,00%	154,73	120,00	60,00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								111,58	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	112,59%	14,00%	50,00%	112,59	112,59	56,30	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	110,57%	14,00%	50,00%	110,57	110,57	55,29	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-								120,00	115,79
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	135,61%	14,00%	33,33%	135,61	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	98,12%	14,00%	33,33%	140,17	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	119,43%	14,00%	33,33%	149,29	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6x-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	96%	14,00%	33,33%	120,40	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								120,00	120,00
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	122,92	14,00%	50,00%	122,92	120,00	60,00	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	117,33	14,00%	50,00%	146,67	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								120,00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	97,99	14,00%	100,00%	122,49	120,00	120,00	
NKO											116,22



Ditandatangani secara elektronik
Untung Sudarwanto



Ditandatangani secara elektronik
Kalpika Widi Nugraha



LAMPIRAN 3

Piagam Penghargaan Predikat Menuju WBBM Tahun 2025



LAMPIRAN 4

Proposal Inovasi KPKNL Sidoarjo

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : **Layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu**
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Pelayanan Lelang (dahulu)
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Salah satu dokumen yang dibutuhkan pengguna jasa dalam pelaksanaan lelang adalah BPHTB dan SKPT, layanan penerbitan BPHTB dan SKPT yang cepat, tepat dan efisien merupakan salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan lelang. Berkaitan dengan hal itu, KPKNL Sidoarjo menawarkan sebuah layanan BPHTB Online Terpadu kepada pembeli dan SKPT Online Terpadu kepada pemohon lelang. Sebagai sebuah inovasi, layanan ini merupakan bentuk kemudahan sebelum pelaksanaan lelang untuk SKPT dan setelah pelaksanaan lelang untuk BPHTB. Melalui layanan ini, kami ingin mempersembahkan citra pelaksanaan lelang yang cepat, transparan, akuntabel dan profesional tanpa dipungut biaya apapun.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarakan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Dengan munculnya inovasi dari beberapa mitra kerja KPKNL Sidoarjo seperti Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pertanahan Nasional dan adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya kemudahan dalam mendapatkan layanan baik di KPKNL maupun dengan instansi mitra kerja KPKNL maka perlu adanya sinergi antar instansi untuk mempermudah layanan bagi masyarakat. Kami menyadari dengan sinergi dan aliansi harapan masyarakat agar layanan bisa dilakukan secara cepat, tepat dan efisien dapat dipenuhi. Untuk itu, KPKNL Sidoarjo bekerjasama dengan Bapenda serta BPN menghadirkan layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu.

3	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu memberikan kemudahan dan percepatan layanan bagi pengguna jasa lelang. Layanan ini terkait dengan tatakelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pengguna jasa. Layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu diharapkan mampu memberikan citra lelang yang baik sehingga kedepannya dapat meningkatkan penjualan lelang dan penerimaan PNPB serta Penerimaan Asli Daerah (PAD).
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai mendapatkan kepuasan dengan memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa. - Pengguna jasa/pembeli lelang merasa terlayani dengan baik. - Citra lelang menjadi lebih baik di mata masyarakat. Sebelum adanya inovasi ini, pembeli mengurus BPHTB ke Bapenda setempat dan SKPT di Kantor Pertanahan setempat. Setelah ada inovasi ini, pengurusan BPHTB dan SKPT cukup di satu tempat, pekerjaan cepet terselesaikan, kepuasan pengguna jasa/pembeli terpenuhi..
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Berdasarkan feedback dari pengguna jasa, kemudahan yang didapat adalah pengguna jasa bisa mendapatkan layanan Bapenda dan BPN di satu tempat saja yaitu di KPKNL. Pengguna jasa/pembeli lelang/pemohon lelang tidak perlu datang ke Bapenda dan BPN untuk mendapatkan layanan terkait lelang.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai alat untuk memberikan kemudahan dengan pemberian layanan di satu tempat yaitu di KPKNL. Selain itu juga memberikan kepastian penyelesaian layanan yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Pelayanan Lelang (dahulu) yang berfungsi sebagai percepatan layanan bagi pengguna jasa lelang/pembeli lelang/pemohon lelang.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pemohon lelang, pemenang lelang, dan internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya). Inovasi percepatan layanan penerbitan merupakan inovasi yang dikembangkan dari SOP layanan penerbitan kutipan risalah lelang.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu melibatkan fungsional Pelelang dan seluruh pelaksana front office KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan BPHTB dan SKPT Online Terpadu. Pengguna jasa yang datang dapat langsung diberikan layanan dengan cepat di satu tempat. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa. Selain itu internalisasi yang dilakukan oleh Petugas Front Office juga menjadi kunci utama keberhasilan layanan ini. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah dan mempercepat penerbitan kutipan risalah lelang kepada pengguna. Dilihat dari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah pegawai untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna jasa/pembeli lelang.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Fungsional Pelelang dibantu Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit yang bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dapat dilakukan evaluasi internal secara berkala dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian waktu penyelesaian yang tertera pada data yang tertulis dalam formulir layanan pasca lelang. - Pengambilan kutipan risalah lelang oleh pengguna jasa/pembeli lelang. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa konsistensi waktu penyelesaian penerbitan kutipan risalah lelang. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna jasa lelang/Pemohon Lelang/Pembeli Lelang, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Fungsional Pelelang dan Petugas Front Office KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif memberikan informasi terkait perhitungan tarif pelaksanaan lelang kepada stakeholders

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi layanan BPHTB dan SKPT Online Terpadu dapat memberikan memberikan kepuasan kepada pengguna jasa lelang karena hak pengguna jasa/pembeli lelang/pemohon lelang lebih cepat terselesaikan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan citra lelang sebagai media jual beli yang cepat, akurat dan transparan. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Inovasi layanan dilakukan secara manual di Bapenda dan BPN setempat</td><td>Inovasi layanan dilakukan di satu tempat saja KPKNL</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Inovasi layanan dilakukan secara manual di Bapenda dan BPN setempat	Inovasi layanan dilakukan di satu tempat saja KPKNL
Sebelum	Menuju WBBM					
Inovasi layanan dilakukan secara manual di Bapenda dan BPN setempat	Inovasi layanan dilakukan di satu tempat saja KPKNL					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Lacak Debitur
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Piutang Negara
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2022 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Penelusuran / Pelacakan (Tracking) Penanggung Utang adalah tugas utama dari seorang Pemegang BKPN, Jurusita atau Pemeriksa Piutang Negara dalam penagihan piutang negara, sehingga keberadaan debitur akan dapat diketahui secara valid. Hal ini juga akan menentukan kesuksesan atau keberhasilan dalam penagihan piutang negara dan memberikan kontribusi untuk Kas Negara. Dalam kaitan tersebut. Kendala yang sebelum ini adalah, keberadaan debitur pada alamat dan posisi keberadaannya tidak valid tersaji dalam BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara), sehingga petugas/pegawai atau Jurusita yang baru menempati tugas di seksi Piutang Negara, mengalami kesulitan saat mengadakan penagihan atau penelitian lapangan terhadap debitur tersebut. Hal ini dikarenakan alamat yang tercantum pada BKPN tertulis tidak lengkap atau ada update alamat / keberadaan posisi debitur yang baru.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Posisi keberadaan debitur yang valid, merupakan bagian keberhasilan dan kesuksesan dari petugas lapangan/juru sita/pemeriksa untuk melakukan penagihan terhadap debitur ke lapangan. Karena, hal ini akan mempermudah dan mempercepat dalam menemukan/menelusuri keberadaan debitur secara update. Menentukan posisi keberadaan debitur yang valid juga dapat dijadikan alat monitoring perkembangan update debitur yang masuk dalam kategori patuh dan mempunyai itikad baik dalam melakukan pembayaran piutang negara.

3	Keselaranan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Lacak Debitur memberikan kemudahan dan percepatan menemukan/menelusuri posisi update keberadaan debitur, sehingga menunjang tata kelola pemerintahan, yaitu membantu petugas lapangan/jurusita/pemeriksa piutang negara dalam keberhasilan penagihan piutang negara dan memberikan kontribusi dalam penerimaan PNPB.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai sebagai Petugas Lapangan/Pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara dapat menyelesaikan pekerjaan penagihan piutang negara lebih mudah dan lebih cepat (efektif dan efisien) - Dengan tertagihnya piutang negara melalui inovasi ini, target penagihan dan penyelesaian piutang negara, baik bagi IKU KPKNL Sidoarjo maupun Penyerah Piutang akan tercapai. - Akan menghemat waktu dan biaya (BBM dan biaya perjalanan dinas) karena inovasi ini membantu untuk tepat sasaran menemukan keberadaan debitur, tanpa harus berkeliling menanyakan kepada pihak pihak lainnya. - Melalui inovasi ini, akan membantu menunjang dalam keberhasilan penagihan piutang negara dan hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan PNPB (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara). Sebelum adanya inovasi ini, petugas lapangan/pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa yang baru menempati tugas di Seksi Piutang Negara, mengalami kesulitan menemukan keberadaan posisi debitur/penanggung utang, dikarenakan alamat debitur pada BKPN tidak update atau tidak lengkap. Setelah ada inovasi ini, petugas lapangan/pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara ataupun Penyerah Piutang yang baru, dapat lebih mudah dan cepat menemukan keberadaan posisi update debitur karena posisi update debitur selalu terekam/tercantum dalam BKPN.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Adanya inovasi Lacak Debitur yang tercantum dalam BKPN, sangat dirasakan manfaatnya oleh petugas lapangan/pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara dan Penyerah Piutang saat melakukan penagihan ke lapangan dan melacak keberadaan debitur/penanggung utang.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai alat panduan atau kompas dan memberikan kemudahan serta percepatan dalam melacak dan menemukan keberadaan debitur/penanggung utang. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi asli yang dikembangkan oleh Seksi Piutang Negara, yang dapat dipakai oleh pegawai yang baru mendapatkan tugas sebagai pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pegawai KPKNL Sidoarjo dan Penyerah Piutang. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya). Dikarenakan tugas penagihan lapangan terhadap debitur/penanggung utang juga dilakukan oleh para pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara di KPKNL Lainnya.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi Lacak Debitur, melibatkan pemegang BKPN/petugas lapangan/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara secara pegawai pada Penyerah Piutang sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan penagihan piutang negara. Petugas lapangan dapat langsung merasakan manfaatnya dengan adanya panduan/kompas yang valid dalam menemukan keberadaan debitur. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini disampaikan kepada pegawai KPKNL sebagai Pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara baik yang lama maupun yang baru, serta stakeholders dari pihak eksternal, yaitu Penyerah Piutang. Sehingga inovasi ini dapat dirasakan manfaatnya baik pihak internal maupun eksternal. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam melanjutkan inovasi ini. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah dan mempercepat tracing/penelusuran debitur. Dilihat dari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah petugas lapangan baik dari internal pegawai KPKNL maupun dari penyerah piutang untuk mensukseskan keberhasilan penagihan piutang negara. Dari segi Efisiensi, inovasi ini sangat membantu dalam menghemat secara waktu dan biaya (BBM dan biaya perjalanan dinas).
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Pegawai pada Seksi Piutang Negara/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara dibantu Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit yang bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi inovasi Lacak Debitur telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian waktu penyelesaian saat penugasan ke lapangan dengan rencana penyelesaian penugasan penagihan. - Adanya Titik Koordinat Map yang tercantum dalam Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). . (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa titik koordinat Map yang tercantum dalam BKPN dan konsistensi waktu penyelesaian penugasan penagihan piutang negara. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pegawai KPKNL Sidoarjo sebagai petugas lapangan/pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara. - Pegawai pada Penyerah Piutang yang melakukan pendampingan (joint program) penagihan piutang negara.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Lacak Debitur dapat memberikan memberikan kepuasan kepada pegawai KPKNL Sidoarjo sebagai petugas lapangan/pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara dan Penyerah Piutang untuk menemukan keberadaan debitur secara valid, mudah dan cepat dalam pelaksanaan tugas penagihan piutang negara di lapangan. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Kesulitan menemukan keberadaan debitur bagi pegawai baru di Seksi Piutang Negara selaku Pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa PN</td><td>Inovasi Lacak Debitur memudahkan dan mempercepat penelusuran keberadaan update posisi debitur sehingga meningkatkan suksesnya penagihan piutang negara.</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Kesulitan menemukan keberadaan debitur bagi pegawai baru di Seksi Piutang Negara selaku Pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa PN	Inovasi Lacak Debitur memudahkan dan mempercepat penelusuran keberadaan update posisi debitur sehingga meningkatkan suksesnya penagihan piutang negara.
Sebelum	Menuju WBBM					
Kesulitan menemukan keberadaan debitur bagi pegawai baru di Seksi Piutang Negara selaku Pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa PN	Inovasi Lacak Debitur memudahkan dan mempercepat penelusuran keberadaan update posisi debitur sehingga meningkatkan suksesnya penagihan piutang negara.					

PROPOSAL INOVASI PANTAU CAPKIN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Pantau Capkin
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Kepatuhan Internal
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2020 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Percapatan pemberian informasi yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pemantauan capaian kinerja untuk level unit kerja. Oleh karena itu, KPKNL Sidoarjo menawarkan sebuah aplikasi sederhana kepada para UIC capaian kinerja. Sebagai sebuah inovasi, aplikasi ini sebagai alat bantu dalam memudahkan <i>updating data</i> capaian setiap minggu. Perhitungan lelang ini memenuhi kepentingan bagi para pengguna dan pengolah data pada masing – masing seksi. Aplikasi yang menggunakan fasilitas dari <i>google spreadsheet</i> ini kami namakan Pantau Capkin. Aplikasi ini berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait dengan Manajemen Kinerja yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan jo. KMK 300/KMK.01/2022. Melalui aplikasi sederhana ini, kami ingin memberikan percepatan pemberian informasi dan juga pemenuhan permintaan dari para pimpinan terkait validasi dan akselerasi penyampaian data capaian kinerja. Selain dengan tujuan di atas, Pantau Capkin juga sebagai sarana pelaksanaan manajemen risiko pada UPR KPKNL Sidoarjo dalam rangka memitigasi risiko gagalnya pencapaian target kinerja KPKNL Sidoarjo karena tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi secara berkala .
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Tuntutan atas akselerasi pengolahan dan penyampaian data terus berkembang setiap waktunya. Kami menyadari, apabila kami masih mempertahankan metode pengalahan data dengan cara lama, maka akselerasi pengolahan data tidak akan tercapai sehingga kami harus membuat peningkatan atas tuntutan yang ada. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada saat ini, KPKNL Sidoarjo berupaya menawarkan terobosan yang baru berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dengan cara yang mudah dan murah. Serta berupaya dapat memitigasi risiko yang timbul dalam upaya pencapaian target organisasi.

3	Keselaranan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Pantau Capkin merupakan inovasi berbasis sistem informasi yang memanfaatkan <i>google spreadsheet</i> dalam pengaplikasiannya. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pengguna jasa. Pantau Capkin dapat memberikan <i>updating data secara real time</i> kepada pihak yang membutuhkan dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa tidak tercapai dalam mencapai target organisasi.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai dapat mengetahui terkait capaian kinerja yang telah di capai sepanjang waktu - Pimpinan unit dapat mengetahui capaian kinerja dari masing – masing seksi yang ada di KPKNL Sidoarjo - Memberikan informasi faktual terkait data yang disajikan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Dapat mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam mencapai target organisasi. Sebelum adanya inovasi ini, Seksi Kepatuhan Internal mengolah data berdasarkan Nota Dinas atau melalui konfirmasi secara informal kepada masing masing PIC seksi . Setelah ada inovasi ini, updating data capaian menjadi lebih mudah karena data dapat di update kapanpun setelah capaian di konfrmasi oleh seksi teknis terkait.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Berdasarkan feedback dari pengguna jasa, kemudahan yang didapat seperti lambat nya perolehan data dapat di minimalisir dan dengan tidak langsung, pengolahan dan penyampaian data dapat lebih cepat tersampaikan kepada seksi Kepatuhan Internal.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai alat yang menjadikan para pihak internal menjadi <i>update</i>. Selain itu juga sebagai keterbukaan data yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Kepatuhan Internal yang berfungsi sebagai keterbukaan informasi mengenai data capaian kinerja pada KPKNL Sidoarjo serta memudahkan memitigasi risiko yang timbul dalam capaian kinerja.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya). Inovasi Pantau Capkin merupakan inovasi yang dikembangkan menjadi web based dimana formula perhitungan itu sendiri sudah tertuang pada peraturan yang berlaku. Serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan bila ditemukan risiko-risiko yang akan timbul dalam mencapai target organisasi.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi Pantau Capkin melibatkan seluruh PIC kinerja pada KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan pengolahan data capaian kinerja serta memudahkan mengambil keputusan bila ditemukan risiko dalam mencapai target. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada seluruh pegawai KPKNL Sidoarjo. Selain itu internalisasi pada pegawai KPKNL Sidoarjo menjadi kunci utama dalam akselerasi penyampaian dan validasi data dan masukan-masukan dalam capaian kinerja. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memgolah data serta memberikan data yang valid sebagai bahan capaian kinerja. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah pemberian informasi mengenai capaian kinerja KPKNL Sidoarjo. Dilihatdari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah seksi KI untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja terbaru. Serta memudahkan memitigasi risiko dalam upaya pencapaian target.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh seksi KI dibantu PIC TIK KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi Pantau Capkin telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian informasi yang disampaikan pada inovasi ini merupakan sangat penting karena informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang akurat dan diakui kebenarannya. - informasi yang up-to-date, informasi yang disajikan pada Pantau Capkin harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu juga. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa updating formula penghitungan capaian kinerja. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik. Serta memudahkan memitigasi risiko capaian kinerja.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - PIC Kinerja KPKNL Sidoarjo, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Unit Pengelola Risiko KPKNL Sidoarjo - Pimpinan Unit KPKNL Sidoarjo selaku pengguna layanan.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Pantau Capkin dapat memberikan informasi yang factual kepada pengguna jasa kinerja karena data yang disajikan dengan cepat telah akurat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Inovasi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait capaian kinerja dan upaya-upaya menanggulangi risiko pada masing – masing seksi pada KPKNL Sidoarjo <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Inovasi masih menggunakan data detail untuk capaian kinerja menggunakan google spreadsheet</td><td>Inovasi telah dikembangkan menjadi lebih sederhana untuk mengakomodir akselerasi penyampaian data secara rekapitulasi dan dapat memitigasi risiko yang akan timbul dalam capaian target.</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Inovasi masih menggunakan data detail untuk capaian kinerja menggunakan google spreadsheet	Inovasi telah dikembangkan menjadi lebih sederhana untuk mengakomodir akselerasi penyampaian data secara rekapitulasi dan dapat memitigasi risiko yang akan timbul dalam capaian target.
Sebelum	Menuju WBBM					
Inovasi masih menggunakan data detail untuk capaian kinerja menggunakan google spreadsheet	Inovasi telah dikembangkan menjadi lebih sederhana untuk mengakomodir akselerasi penyampaian data secara rekapitulasi dan dapat memitigasi risiko yang akan timbul dalam capaian target.					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Layanan Area Pelayanan Terpadu (APT) Digital
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Piutang Negara
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2022 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Kemudahan informasi yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan tersebut. Oleh karena itu, KPKNL Sidoarjo menawarkan sebuah link sederhana kepada para stakeholders dan masyarakat pengguna jasa pelayanan berupa Link https://linktr.ee/KPKNLSDA. Sebagai sebuah inovasi, link ini sebagai alat bantu dalam memudahkan kunjungan tamu pada KPKNL Sidoarjo. Layanan APT digital untuk para pengguna jasa KPKNL Sidoarjo yang dapat diakses melalui sebuah link yang meliputi Buku Tamu Digital, Survei Kepuasan Digital, Tutorial Layanan di Bidang Lelang, Piutang, Penilaian dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan layanan pengaduan masyarakat serta Penelusuran Permohonan Stakeholders dan Menerima Panggilan dan/atau Video Call aplikasi WA.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Kunjungan tamu semenjak pandemic covid-19 melandai terlihat dari tahun ke tahun terus meningkat. Kami menyadari bahwa upaya-upaya yang kami lakukan selama ini harus lebih meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin mudah dan cepatnya pelayanan di semua lini instansi. Tantangan di era digital sekarang ini juga harus diperhitungkan sebagai peluang kita lebih kreatif dan cerdas dalam upaya pelayanan. Untuk itu, KPKNL Sidoarjo berupaya untuk menawarkan terobosan yang baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dengan cara yang mudah, cepat, praktis dan murah.

3	Keselaranan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi APT digital merupakan inovasi berbasis sistem informasi yang memanfaatkan website dalam pengaplikasiannya. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pengguna jasa. APT digital yang berfungsi sebagai buku tamu sekaligus informasi layanan KPKNL dapat memberikan kemudahan kepada tamu/stakeholders KPKNL Sidoarjo
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai dapat mengetahui data tamu/pengunjung KPKNL; - Pengguna jasa dapat mengetahui jenis layanan yang diinginkan; - Memberikan informasi faktual terkait data kepuasan pengguna layanan. Sebelum adanya inovasi ini, petugas APT memberikan layanan secara manual. Setelah ada inovasi ini, pelayanan APT menjadi cepat dan mudah karena terdapat alat bantu. Selain itu APT digital juga didukung dengan barcode khusus sehingga tamu hanya tinggal scan barcode tersebut dari perangkatnya dan langsung terkoneksi dengan APT digital.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Berdasarkan <i>feedback</i> dari pengguna jasa, kemudahan yang didapat seperti buku tamu online, jenis layanan yang diinginkan serta memantau permohonan dan juga dapat terhubung jika ingin melakukan panggilan atau video call dengan petugas KPKNL. Pengguna jasa juga tidak perlu antri mendapatkan informasi layanan.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai alat bantu yang menjadikan para pengguna jasa pelayanan menjadi mandiri dengan memilih sendiri kebutuhan layanan yang diinginkan sehingga mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Piutang Negara selaku Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi tamu/pengunjung KPKNL, dan internal KPKNLSidoarjo terutama petugas APT. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya). Inovasi APT digital merupakan inovasi yang dikembangkan menjadi web based dimana penggunaannya cukup scan barcode dan langsung terhubung dengan APT digital.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi APT digital melibatkan pelaksana dan/atau PPNN dan seluruh pelaksana front office KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan pelayanan. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa. Selain itu internalisasi yang dilakukan oleh Petugas Front Office juga menjadi kunci utama memberikan sharing penggunaan APT digital. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan informasi mengenai APT digital baik via media sosial kantor maupun saat di APT KPKNL Sidoarjo (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah pemberian informasi mengenai APT digital kepada tamu/pengunjung. Dilihat dari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah pegawai untuk memberikan informasi mengenai layanan KPKNL. Dari segi sosial, inovasi ini sangat efektif digunakan karena mengurangi risiko terlalu lama dalam memberikan layanan..
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Kepala KPKNL dan Kepala Subbag Umum yang memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara periodik dengan memantau apakah implementasi APT digital telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut. Selain itu evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung melalui monitoring capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan masukan dari pengguna jasa.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian informasi yang disampaikan pada inovasi ini merupakan sangat penting karena informasi tersebut harus berisi layanan KPKNL. - informasi yang up-to-date, informasi yang disajikan pada APT digital harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu juga . (Gambar/ Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa updating jenis layanan. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna jasa KPKNL, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Petugas Front Office KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif memberikan informasi terkait jenis layanan kepada stakeholders

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) APT digital dapat memberikan informasi yang factual kepada pengguna jasa KPKNL karena menampilkan jenis layanan KPKNL dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Inovasi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait jenis layanan dengan menyajikan layanan secara ringkas, cepat dan informatif. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Inovasi berbasis web dengan menu yang masih kurang lengkap</td><td>Inovasi telah dikembangkan menjadi berbasis web dengan menu tambahan seperti telusuri permohonan dan tambahan panggilan/video call dengan petugas</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Inovasi berbasis web dengan menu yang masih kurang lengkap	Inovasi telah dikembangkan menjadi berbasis web dengan menu tambahan seperti telusuri permohonan dan tambahan panggilan/video call dengan petugas
Sebelum	Menuju WBBM					
Inovasi berbasis web dengan menu yang masih kurang lengkap	Inovasi telah dikembangkan menjadi berbasis web dengan menu tambahan seperti telusuri permohonan dan tambahan panggilan/video call dengan petugas					

PROPOSAL INOVASI KAWAL IP (INTEGRITAS DAN PROGRAM)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Kawal IP (Integritas dan Program)
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Kepatuhan Internal
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Rapat koordinasi dan internalisasi dua pekanan setiap hari Selasa untuk mengawal integritas pegawai dan program kerja dua pekanan. Hari Selasa untuk Pejabat Eselon IV dan Hari Jumat untuk Semua Pegawai pada setiap Seksi/Sub Bagian Umum sebagai forum monitoring dan evaluasi kinerja pada KPKNL Sidoarjo sekaligus sebagai tools manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko tidak tercapainya target kinerja organisasi. Forum ini sebagai sarana yang disediakan untuk para atasan langsung agar dapat melakukan evaluasi kepada para bawahan langsung secara periodic (Mingguan) berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan jo. KMK 300/KMK.01/2022.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Tuntutan atas komitmen atas integritas para pegawai KPKNL Sidoarjo yang terus harus dijaga membuat kami menyadari bahwa pemeliharaan atas integritas pegawai tidak bisa hanya di laksanakan sekali dalam setahun, sehingga kami harus mempercepat dan memperkuat integritas para pegawai KPKNL Sidoarjo dengan cara melakukan evaluasi dan koordinasi secara periodik dan terjadwal. Serta memitigasi hal-hal yang berhubungan dengan risiko bila kemungkinan capaian tidak dapat dicapai.

3	Keselaran dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Kawal IP (Integritas dan Program) merupakan inovasi yang berbasis sistem informasi yang memanfaatkan <i>google spreadsheet</i> dalam pengaplikasiannya. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pengguna jasa. Kawal IP dapat memberikan <i>updating data</i> secara <i>real time</i> kepada pihak yang membutuhkan.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai dapat mengetahui terkait capaian kinerja yang telah di capai sepanjang waktu - Pengguna jasa dapat mengetahui capaian kinerja dari masing – masing seksi yang ada di KPKNL Sidoarjo - Memberikan informasi faktual terkait data yang disajikan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung secara periodik (mingguan) - Sebagai bahan monitoring pelaksanaan mitigasi risiko yang telah direncanakan oleh para <i>Unit in Charge</i>. Sebelum adanya inovasi ini, atasan langsung memberikan evaluasi kepada bawahan tanpa ada jadwal yang jelas, sehingga integritas dan program yang telah dicanangkan tidak dapat dievaluasi dengan baik. Setelah ada inovasi ini, updating data capaian menjadi lebih mudah karena data dapat di update kapanpun setelah capaian di konfirmasi oleh seksi teknis terkait. Sehingga evaluasi atas kinerja bawahan pun dapat dilakukan dengan cepat dan terjadwal.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Berdasarkan feedback dari pengguna jasa, kemudahan yang didapat seperti lambat nya evaluasi atas kinerja bawahan dapat di minimalisir dan dengan tidak langsung, pengolahan dan penyampaian data dapat lebih cepat tersampaikan kepada seksi Kepatuhan Internal.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai alat yang memberikan forum monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu juga sebagai keterbukaan data yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Kepatuhan Internal yang berfungsi sebagai keterbukaan informasi mengenai data capaian kinerja pada KPKNL Sidoarjo serta memitigasi risiko yang ada dalam usaha pencapaian target.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya). Inovasi Kawal IP merupakan inovasi yang dikembangkan menjadi kegiatan rutin dalam memantau dan memitigasi risiko capaian target.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi Kawal IP melibatkan seluruh PIC kinerja pada KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan pengolahan data capaian kinerja. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada seluruh pegawai KPKNL Sidoarjo. Selain itu internalisasi pada pegawai KPKNL Sidoarjo menjadi kunci utama dalam akselerasi penyampaian dan validasi data. Peranan pimpinan unit sangat di butuhkan dalam mengkoordinir seluruh SDM yang ada pada KPKNL Sidoarjo. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengolah data serta memberikan data yang valid sebagai bahan capaian kinerja. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah pemberian informasi mengenai capaian kinerja KPKNL Sidoarjo. Dilihatdari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah seksi KI untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja terbaru.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Unit dibantu oleh Seksi Kepatuhan Internal selaku pengawas internal KPKNL Sidoarjo. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap dua mingguan dimana Kepala Kantor memantau apakah Kawal IP telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian informasi yang disampaikan pada inovasi ini merupakan sangat penting karena informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang akurat dan diakui kebenarannya. - Evaluasi atas kinerja bawahan berupa laporan tertulis setiap semester kepada pimpinan Unit. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa hasil evaluasi atas kinerja bawaha. Saran dan masukan dari atasan langsung juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Seluruh pegawai KPKNL Sidoarjo - Pimpinan Unit KPKNL Sidoarjo. - Unit pengelolaan Kinerja dan Risiko KPKNL Sidoarjo

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Kawal IP dapat memberikan informasi yang factual kepada pimpinan unit karena data yang disajikan telah divalidasi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi forum monitoring dan evaluasi kinerja dan memitigasi risiko pada KPKNL Sidoarjo <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Evaluasi kinerja yang tidak dilakukan secara terjadwal</td><td>Inovasi kinerja telah dilakukan secara periodik dan terjadwal setiap 2 pekan dengan jadwal sebagai berikut: Hari Selasa untuk pejabat Eselon IV dan jabatan fungsional</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Evaluasi kinerja yang tidak dilakukan secara terjadwal	Inovasi kinerja telah dilakukan secara periodik dan terjadwal setiap 2 pekan dengan jadwal sebagai berikut: Hari Selasa untuk pejabat Eselon IV dan jabatan fungsional
Sebelum	Menuju WBBM					
Evaluasi kinerja yang tidak dilakukan secara terjadwal	Inovasi kinerja telah dilakukan secara periodik dan terjadwal setiap 2 pekan dengan jadwal sebagai berikut: Hari Selasa untuk pejabat Eselon IV dan jabatan fungsional					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Obrolan Seputar Tusi (OBSESI)
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Pelayanan Lelang (dahulu)
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Adanya kebutuhan wadah untuk melakukan obrolan ringan pejabat/pegawai dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi terkait tugas dan fungsi pegawai. Melalui Obsesi ini diharapkan <i>soft competency</i> pegawai dapat terpenuhi diluar dari mandatory maupun acara <i>sharing sesion</i> eksternal lainnya. Kegiatannya dilaksanakan secara online dan dapat dilaksanakan pula secara offline dengan metode penyampaian secara informal santai namun bermanfaat bagi pegawai.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarakan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Tujuan dari adanya obsesi ini adalah wadah untuk mempertemukan para pegawai dalam satu forum untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan kompetensi sekaligus ajang untuk mempererat silaturahmi dengan materi yang menarik, santai namun dapat meningkatkan <i>soft competency</i> pegawai.

3	Keselaranan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi. Dengan meningkatnya pengetahuan pegawai diharapkan kompetensi akan bertambah yang selanjutnya dengan penambahan kompetensi akan berakibat pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai dapat bertambah pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya. - Pengguna jasa dapat merasakan peningkatan pelayanan seiring dengan meningkatnya kompetensi - Mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Melalui inovasi ini pegawai akan meningkat pengetahuan, pemahaman dan kompetensi. Dengan peningkatan kompetensi segala kekurangan yang ada dapat diminimalisir dan kelemahan tata kelola, administrasi atau pelayanan dapat dihilangkan melalui sharing knowledge dan masukan dari para pegawai dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan tata kelola.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah selain sebagai wadah sharing knowledge tetapi juga menjadi wadah pertukaran informasi dan penyampaian kendala saran dan masukan yang mendorong perbaikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi asli gagasan dari pegawai dengan konsep <i>sharing knowledge</i> yang dibawakan secara santai namun menambah ilmu pegawai.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi internal KPKNLSidoarjo maupun eksternal secara tidak langsung. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi ini melibatkan seluruh pegawai KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini tidak menggunakan biaya, pelaksanaan kegiatan cukup dengan media telekonferensi maupun tatap muka langsung. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Penyampaian jadwal kegiatan, pengisi kegiatan disampaikan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan dan diinformasikan kembali pada hari H pelaksanaan dengan informasi tautan media telekonferensi atau informasi melalui nadine dengan menyebutkan waktu dan tempat pelaksanaan. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk peningkatan kompetensi. Dari sisi aspek sosila kegiatan ini dapat mempererat sinergitas internal pegawai.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Evaluasi kegiatan dilakukan 6 bulan satu kali, adapun dampak dari inovasi ini sangat positif namun belum dilakukan evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lainnya yang relevan.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan.. - Pemahaman pegawai dengan indikator open question. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa updating jenis lelang yang memiliki tarif berbeda-beda. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua pegawai internal

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%) (Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi. pengetahuan yang didapat oleh pemateri dapat tersebar secara efektif melalui audience yang hadir <table> <tr> <th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr> <tr> <td>Kegiatan dilaksanakan 2 minggu sekali</td><td>Kegiatan dilaksanakan setiap minggu,</td></tr> </table>	Sebelum	Menuju WBBM	Kegiatan dilaksanakan 2 minggu sekali	Kegiatan dilaksanakan setiap minggu,
Sebelum	Menuju WBBM				
Kegiatan dilaksanakan 2 minggu sekali	Kegiatan dilaksanakan setiap minggu,				

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Sidak Plus
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Kepatuhan Internal
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2023 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Dalam rangka melaksanakan pemantauan penerapan sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyusun rencana pemantauan tahunan sebagai acuan bagi Unit Kepatuhan Internal dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Salah satu pemantauan dimaksud adalah Pemantauan Penegakan Integritas dan Etika, maka disusunlah Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 592/KN/2022 tentang Rencana Pemantauan Tahunan Penegndalian Intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2023.Untuk itu perlu dilakukan pemantauan pengendalian salah satu melalui Sidak Plus yakni pemantauan kehadiran pegawai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke semua pegawai dengan nilai plus mengecek laci/meja pegawai.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Dalam pemantauan sidak plus ini mempunyai tujuan : 1. Menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas; 2. Mematuhi ketentuan jam kerja baik pada saat Work From Office (WFO) maupun Work From Home (WFH) serta senantiasa mematuhi protokol kesehatan selama kondisi pandemi COVID-19 3. Mendukung UKI agar melakukan pemantauan kode etik dengan objektif dan independen sesuai kedudukannya sebagai lini kedua dalam implementasi pengendalian intern; 4. Para pejabat agar menjadi teladan dalam menjaga integritas, pemanfaatan waktu kerja, dan melakukan pengawasan terhadap bawahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

3	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Sidak Plus ini merupakan inovasi yakni pemantauan dengan inspeksi mendadak dengan dilakukan melalui mengunjungi ruang kerja pegawai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk mengetahui keberadaan pegawai pada saat jam kerja serta memantau meja/laci pegawai yang disidak tersebut.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai akan diketahui integritasnya dalam bekerja; - Mengetahui bila pegawai dimaksud bekerja dengan jujur dengan tidak menyimpang dari gratifikasi/korupsi; - Memberikan informasi kepada Kepala Kantor tentang kehadiran seluruh pegawai dan mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam gratifikasi/korupsi.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Berdasarkan data kehadiran plus ini dapat mengetahui keadaan pegawai dalam mematuhi kehadiran dalam bekerja dan dapat memastikan bahwa pegawai yang bersangkutan tidak melakukan gratifikasi/korupsi.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) inovasi ini adalah sebagai alat yang menjadikan para pegawai menanamkan integritas dalam diri masing-masing. Selain itu juga sebagai keterbukaan data untuk memitigasi risiko bila ada pegawai yang menyimpang dari aturan. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Kepatuhan Internal yang berfungsi sebagai pencegahan hal-hal yang negatif dalam bekerja pada KPKNL Sidoarjo
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya). Inovasi Pantau Sidak Plus merupakan inovasi yang sangat diperlukan untuk meninjau integritas pegawai di KPKNL Sidoarjo.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi Sidak Plus melibatkan PIC kinerja pada KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan memantau integritas pegawai. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada seluruh pegawai KPKNL Sidoarjo. Selain itu internalisasi pada pegawai KPKNL Sidoarjo menjadi kunci utama dalam akselerasi menumbuhkan integritas dalam diri pegawai. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam mematuhi jam kerja dan menghindari gratifikasi/korupsi. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah memantau integritas pegawai KPKNL Sidoarjo. Dilihat dari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah seksi KI untuk memberikan informasi mengenai mitigasi risiko yang timbul dari pemantauan kehadiran ini.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh seksi KI KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi Sidak Plus telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian informasi yang disampaikan pada inovasi ini merupakan sangat penting karena kehadiran pegawai tersebut harus merupakan sesuatu yang akurat dan diakui kebenarannya. - informasi yang up-to-date, informasi yang disajikan pada Sidak Plus harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu juga. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa melakukan internalisasi kode etik pegawai ke seluruh pegawai. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - PIC Kinerja KPKNL Sidoarjo, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Pimpinan Unit KPKNL Sidoarjo selaku Lini Pertama dalam memantau kehadiran pegawainya.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Sidak Pus dapat memberikan informasi yang factual kepada Kepala Kantor karena data yang disajikan dengan dapat menjadi acuan melakukan pembinaan ke seluruh pegawainya. Inovasi ini diharapkan dapat mengetahui integritas seluruh pegawai dalam mematuhi jam kerja dan tidak melakukan gratifikasi dalam bekerja di KPKNL Sidoarjo <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Inovasi hanya memantau kehadiran saja.</td><td>Inovasi telah dikembangkan selain memantau kehadiran pegawai juga melakukan mengecek laci/meja pegawai.</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Inovasi hanya memantau kehadiran saja.	Inovasi telah dikembangkan selain memantau kehadiran pegawai juga melakukan mengecek laci/meja pegawai.
Sebelum	Menuju WBBM					
Inovasi hanya memantau kehadiran saja.	Inovasi telah dikembangkan selain memantau kehadiran pegawai juga melakukan mengecek laci/meja pegawai.					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Informasi Data Pengurusan Piutang Negara (SITARUS)
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Piutang Negara
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2022 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Kebutuhan penyajian data yang valid dan update piutang negara merupakan hal yang utama dan penting bagi KPKNL maupun Penyerah Piutang. Data yang valid dan update piutang negara adalah data pembayaran dan tahap pengurusan piutang negara dari debitur yang telah diserahkan oleh penyerah piutang dan telah dilakukan pengurusan atau penagihan piutang negara oleh KPKNL Sidoarjo. Berkaitan dengan hal tersebut, monitoring dan pelaporan penyajian data piutang negara secara valid dan update adalah sebuah keharusan bagi KPKNL Sidoarjo selaku pengelola piutang negara dan Penyerah Piutang selaku Pengguna Jasa yang telah menyerahkan piutangnya. Sehingga tercipta data piutang negara rekonsiliasi yang cocok, akurat dan akuntabel. Inovasi Sitarus ini diciptakan oleh KPKNL Sidoarjo untuk menjembatani dan memudahkan bagi Penyerah Piutang untuk secara update memonitor perkembangan tahap pengurusan dan pembayaran debitur sebagai sarana monitoring dan pelaporan secara berkala melalui link online yang dapat diakses oleh penyerah piutang.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Penyajian data piutang negara yang valid dan update merupakan dasar dan pedoman bagi pengguna jasa, dalam hal ini penyerah piutang untuk melakukan monitoring dan pelaporan serta bahan rekonsiliasi data piutang negara antara KPKNL dengan Penyerah Piutang secara periodik setiap awal bulan. Tujuan dari gagasan ini adalah memberikan sajian data yang mudah diakses oleh pengguna jasa, dalam hal ini penyerah piutang agar dapat memonitor setiap bulannya melalui link online bagaimana dan sampai dimana proses penagihan yang dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo, meliputi perkembangan tahap pengurusan piutang negara dan pembayaran yang dilakukan oleh debitur.

3	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Lacak Debitur memberikan kemudahan dan percepatan mendapatkan akses perkembangan data pengelolaan piutang negara sehingga menunjang tata kelola pemerintahan, yaitu membantu penyerah piutang untuk melakukan monitoring dan pelaporan serta rekonsiliasi data piutang negara antara KPKNL dengan Penyerah Piutang .
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Bagi Pegawai KPKNL Sidoarjo, sebagai monitoring dan pelaporan data pengelolaan piutang negara, sehingga baik pemegang BKPN maupun Kepala Seksi Piutang Negara dapat menentukan langkah/tindakan penagihan piutang atau penanganan terhadap para debitur/penanggung utang. - Bagi Penyerah Piutang sebagai pengguna jasa, sebagai monitoring dan pelaporan maupun sebagai data rekonsiliasi data piutang negara antara KPKNL dengan Penyerah Piutang. Ataupun bahan penagihan bersama (joint program) antara KPKNL dengan Penyerah piutang. - Memudahkan penyajian data saat ada pengawasan atau pemeriksaan dari Aparat Pengawas/ APIP di KPKNL maupun Penyerah Piutang . - Sebagai bahan menentukan kebijakan atau analisa bagi pimpinan dalam efektivitas penagihan piutang negara. Sebelum ada inovasi ini, penyerah piutang tidak mendapatkan akses langsung dan mudah, akan tetapi harus melalui surat permintaan data ke KPKNL. Atau Penyerah Piutang harus datang ke KPKNL untuk melakukan rekonsiliasi atau menanyakan data perkembangan piutang negara ke KPKNL Sidoarjo. Dengan inovasi ini, Penyerah piutang cukup dengan online langsung mendapatkan data piutang negara secara valid dan update.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Adanya inovasi Sitarus, sangat dirasakan manfaatnya oleh Penyerah piutang dalam monitoring, pelaporan, rekonsiliasi maupun joint program antara KPKNL dengan Penyerah Piutang, sehingga jelas sangat menunjang dalam tata kelola, administrasi umum maupun pelayanan pada KPKNL Sidoarjo.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah adanya sarana online yang dapat diakses bersama antara KPKNL dengan Penyerah Piutang untuk kemudian Penyerah Piutang dapat menggunakannya sebagai data valid dan update setiap bulannya perkembangan data pengelolaan piutang negara tanpa harus repot datang atau mengirim surat permintaan data ke KPKNL Sidoarjo. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi asli yang dikembangkan oleh Seksi Piutang Negara, yang dapat dipakai oleh KPKNL lain sebagai replikasi atau modifikasi.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pegawai KPKNL dan Penyerah Piutang. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusunan inovasi dan/atau waktu penerapannya). Dikarenakan tugas monitoring, pelaporan, rekonsiliasi dan joint program antara KPKNL dan Penyerah Piutang juga dapat dilakukan pada KPKNL Lainnya.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi Sitarus, melibatkan pegawai KPKNL sebagai pemegang BKPN maupun pimpinan (Kasi atau Kepala Kantor) dan Pegawai pada Penyerah Piutang sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi data pengelolaan piutang negara. Pegawai KPKNL dan Penyerah Piutang dapat langsung merasakan manfaatnya dengan adanya data online pengelolaan piutang negara. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini disampaikan kepada pegawai KPKNL sebagai Pemegang BKPN dan stakeholders dari pihak eksternal, yaitu Penyerah Piutang. Sehingga inovasi ini dapat dirasakan manfaatnya baik pihak internal maupun eksternal. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam melanjutkan inovasi ini. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah dan mempercepat Pegawai KPKNL dan Penyerah Piutang. Dilihat dari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah stakeholders baik dari internal (pegawai, pimpinan, kanwil dan pusat) maupun dari eksternal (penyerah piutang dan APIP) dalam memperoleh data pengurusan piutang negara yang valid dan update. Dari segi Efisiensi, inovasi ini sangat membantu dalam menghemat secara waktu dan biaya (BBM dan biaya perjalanan dinas) bagi Penyerah Piutang dengan tanpa harus datang langsung ke KPKNL.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Pegawai pada Seksi Piutang Negara dibantu Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit yang bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi inovasi Sitarus telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian waktu penyajian data pengurusan piutang negara secara update pada setiap bulannya. - Data piutang negara yang update, baik tahap pengurusan piutang negara maupun data pembayaran debitur piutang negara. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa waktu penyajian data tersebut dan isi/konten data perkembangan yang telah di update. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pegawai KPKNL Sidoarjo sebagai pemegang BKPN/Jurusita/Pemeriksa Piutang Negara yang menyajikan data pengurusan piutang negara secara online. - Pimpinan (Kasi maupun Kepala Kantor) sebagai alat monitoring dan pelaporan ke Kanwil atau Pusat. - Pegawai pada Penyerah Piutang yang melakukan monitoring, pelaporan, rekonsiliasi atau joint program dengan KPKNL - Pemeriksa sebagai data pemeriksaan atau pengawasan

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Sitarus dapat memberikan memberikan kepuasan kepada pegawai KPKNL Sidoarjo sebagai pemegang BKPN atau Kasi/Kepala Kantor dan Penyerah Piutang untuk mempermudah mengakses data pengurusan piutang negara yang valid dan update. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Penyerah Piutang mengirimkan surat permintaan data atau datang ke KPKNL untuk melakukan monitoring, pelaporan dan rekonsiliasi pengurusan piutang negara</td><td>Inovasi Sitarus memudahkan Penyerah Piutang untuk meng-akses secara online, perkembangan data pengurusan piutang negara yang valid dan update guna monitoring, pelaporan dan rekonsiliasi piutang negara.</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Penyerah Piutang mengirimkan surat permintaan data atau datang ke KPKNL untuk melakukan monitoring, pelaporan dan rekonsiliasi pengurusan piutang negara	Inovasi Sitarus memudahkan Penyerah Piutang untuk meng-akses secara online, perkembangan data pengurusan piutang negara yang valid dan update guna monitoring, pelaporan dan rekonsiliasi piutang negara.
Sebelum	Menuju WBBM					
Penyerah Piutang mengirimkan surat permintaan data atau datang ke KPKNL untuk melakukan monitoring, pelaporan dan rekonsiliasi pengurusan piutang negara	Inovasi Sitarus memudahkan Penyerah Piutang untuk meng-akses secara online, perkembangan data pengurusan piutang negara yang valid dan update guna monitoring, pelaporan dan rekonsiliasi piutang negara.					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Buku Saku Digital Kode Etik Pegawai
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Subbagian Umum
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2022 sd. sekarang
- E. Kategori : Manajemen Sumber Daya Manusia

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Peningkatan pemahaman kode etik sebagai salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan terhadap pengguna layanan. Oleh karena itu, KPKNL Sidoarjo menawarkan sebuah inovasi sederhana kepada para pegawai. Sebagai sebuah inovasi, buku digital ini sebagai alat bantu dalam memudahkan pegawai dalam mempelajari kode etik pegawai, yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Melalui aplikasi sederhana ini, kami ingin mempersembahkan pelayanan yang informatif, transparan, akuntabel dan profesional.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambar/ jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Peningkatan pemahaman kode etik sebagai salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan terhadap pengguna layanan. Oleh karena itu, KPKNL Sidoarjo menawarkan sebuah inovasi sederhana kepada para pegawai. Sebagai sebuah inovasi, buku digital ini sebagai alat bantu dalam memudahkan pegawai dalam mempelajari kode etik pegawai, yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

3	Keselaranan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Buku Saku Digital Kode Etik Pegawai merupakan inovasi berbasis Digital yang bertujuan meningkatkan pemahaman kode etik yang merupakan salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan terhadap pengguna layanan
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai dapat mempelajari kode etik pegawai dimanapun dan kapanpun; - Pegawai semakin memahami dan dapat mengamalkan nilai-nilai kode etik pegawai; - Pengguna layanan memperoleh layanan yang semakin informatif, transparan, akuntabel dan profesional. Sebelum adanya inovasi ini, pegawai KPKNL Sidoarjo mempelajari kode etik melalui buku kode etik (<i>hardcopy</i>) yang dapat saja tertinggal atau hilang. Setelah ada inovasi ini, pegawai KPKNL Sidoarjo lebih mudah dalam mempelajari kode etik pegawai.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Pegawai yang memahami dan mengamalkan kode etik pegawai dapat memberikan pelayanan yang semakin informatif, transparan, akuntabel dan profesional sehingga meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman kode etik pegawai sebagai salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan terhadap pengguna layanan. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Subbagian Umum yang berfungsi meningkatkan perilaku pegawai agar selalu sesuai dengan nilai-nilai kode etik pegawai.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pengguna layanan dan internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi melibatkan Subbagian Umum KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi dan tidak memerlukan biaya. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pegawai KPKNL Sidoarjo melalui grup whatsapp maupun tautan pada google drive (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah pembelajaran mengenai kode etik pegawai. Dari segi sosial, inovasi ini sangat efektif digunakan karena meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kode etik.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Kasubbag Umum.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian informasi yang disampaikan pada inovasi ini merupakan sangat penting karena informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang akurat dan diakui kebenarannya. - informasi yang up-to-date, kode etik yang tertulis dalam buku kode etik digital harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu juga. (Gambar/ Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa updating kode etik sesuai peraturan terbaru.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna jasa layanan, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini melalui survei pengguna layanan. - Pegawai KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif sebagai pelaksana kode etik pegawai.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%) (Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Buku Kode Etik Digital dapat memberikan informasi yang kepada pegawai KPKNL Sidoarjo. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai KPKNL Sidoarjo dalam mengamalkan kode etik pegawai. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buku Kode Etik berupa <i>hardcopy</i></td><td>Inovasi telah dikembangkan menjadi Buku Kode Etik Digital</td></tr> </tbody> </table>	Sebelum	Menuju WBBM	Buku Kode Etik berupa <i>hardcopy</i>	Inovasi telah dikembangkan menjadi Buku Kode Etik Digital
Sebelum	Menuju WBBM				
Buku Kode Etik berupa <i>hardcopy</i>	Inovasi telah dikembangkan menjadi Buku Kode Etik Digital				

PROPOSAL INOVASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Gerakan Disiplin Keren (GDK)
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Pengembangan SDM
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2024 s.d. seterusnya
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Sesuai dengan Program Budaya Kementerian Keuangan, Dua menit sebelum jadwal, mengandung pengertian : Melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat 2 (dua) menit sebelum rapat di mulai sesuai jadwal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat. Berkaitan dengan hal tersebut, KPKNL Sidoarjo bertekad untuk melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat 2 (dua) menit sebelum rapat dimulai sesuai jadwal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Guna menunjang pegawai dalam menjalankan tupoksi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan dalam melayani pengguna layanan secara maksimal, perlu adanya program atau kegiatan bagi seluruh SDM atau pegawai untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan capaian kinerja dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa/stakeholders. Karena kedisiplinan pegawai yang kuat tentunya sangat bermanfaat bagi pengguna jasa, dibandingkan dengan pegawai yang kurang disiplin. Untuk itu, perlu diciptakan kegiatan untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai khususnya pegawai KPKNL Sidoarjo.

3	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Gerakan Disiplin Keren menciptakan pegawai yang kuat mental dalam bekerja dilihat dari segi kedisiplinan sehingga pengembangan SDM dapat tercapai, kinerja dapat maksimal dan pelayanan kepada stakeholder akan meningkat.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Bagi Pegawai KPKNL Sidoarjo, meningkatnya tingkat kedisiplinan dalam berkinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. - Bagi Organisasi, pegawai yang disiplin akan membuat Keputusan yang tepat dan sangat menunjang tercapainya target capaian kinerja pegawai dan organisasi. - Bagi stakeholders, pelayanan terhadap pengguna akan lebih meningkat - Tingkat kepuasan Pengguna Jasa akan semakin meningkat. Sebelum ada inovasi ini, tidak ada kegiatan yang terprogram dalam menjaga menjaga dan/atau meningkatkan kedisiplinan. Dengan inovasi ini, kedisiplinan pegawai dapat terjaga dengan kegiatan yang terarah dan terprogram.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Adanya inovasi Gerakan Disiplin Keren, akan berdampak secara langsung bagi setiap pegawai dan bagi organisasi (KPKNL) dan secara tidak langsung juga kepada pengguna layanan/stakeholders.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah kegiatan yang terarah dan terprogram untuk menanamkan sikap disiplin seluruh pegawai /ppnpn KPKNL Sidoarjo (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi asli yang dikembangkan oleh Sub Bagian Umum pada KPKNL Sidoarjo, yang dapat dipakai oleh KPKNL lain sebagai replikasi atau modifikasi.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pengguna jasa maupun KPKNL. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Gerakan Disiplin Keren menggunakan sumber daya manusia dan Sarana Prasarana. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal) Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa serta internalisasi pada pegawai dan non pegawai pada KPKNL Sidoarjo yang dilakukan dengan membiasakan para pegawai pada setiap kegiatan yang dijadwalkan secara teratur, terarah dan menjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk dilakukan. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus

		dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL Sidoarjo dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan inovasi ini di KPKNL Sidoarjo. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Aspek Sosial : Gerakan Disiplin Keren akan menciptakan kondisi sosial yang baik dan kondusif dalam wujud kedisiplinan, kerukunan dan kekompakan serta kebersamaan seluruh pegawai dan non pegawai pada KPKNL Sidoarjo. Kondisi tersebut, tentunya akan mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja nya. Aspek Lingkungan : Inovasi Gerakan Disiplin Keren ini akan berperan dalam usaha membentuk pola pikir yang disiplin untuk penggunaan sumber daya energi, karena pada tiap kegiatan akan terselenggara sesuai dengan waktu yang direncanakan.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan Seksi Kepatuhan Internal serta Kepala KPKNL Sidoarjo seluruh jajaran pimpinan/pejabat pada KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit yang bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi dan pelaksanaan inovasi Gerakan Disiplin Keren telah berjalan dengan baik sesuai rencana atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian antara realisasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Disiplin Keren dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, ketepatan waktu dalam pelaporan kegiatan secara bulanan dilakukan kepada Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo. - Naiknya tingkat kepuasan pengguna layanan KPKNL Sidoarjo khususnya para pegawai dan non pegawai di lingkungan KPKNL Sidoarjo. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk keberlanjutan dan perbaikan inovasi. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Seluruh pegawai dan non pegawai KPKNL Sidoarjo berperan aktif dalam kegiatan GDK ini - Dari Eksternal, testimoni para stakeholder merupakan pihak eksternal yang dapat mencerminkan hasil dari kegiatan GDK ini.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Gerakan Disiplin Keren dapat memberikan dampak kepada seluruh pegawai dan non pegawai pada KPKNL Sidoarjo untuk lebih disiplin sehingga akan mempengaruhi perilaku dan pola pikir yang dapat meningkatkan kinerja yang terwujud dalam NKO (Nilai Kinerja Organisasi) menjadi lebih baik. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Belum ada kegiatan terarah atau terprogram yang dilakukan berkaitan dengan kedisiplinan SDM di KPKNL Sidoarjo.</td><td>Gerakan Disiplin Keren adalah pembiasaan perilaku dan pola pikir yang terarah dan terprogram. Inovasi ini dibuat untuk dilakukan disetiap kegiatan yang ada di KPKNL Sidoarjo</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Belum ada kegiatan terarah atau terprogram yang dilakukan berkaitan dengan kedisiplinan SDM di KPKNL Sidoarjo.	Gerakan Disiplin Keren adalah pembiasaan perilaku dan pola pikir yang terarah dan terprogram. Inovasi ini dibuat untuk dilakukan disetiap kegiatan yang ada di KPKNL Sidoarjo
Sebelum	Menuju WBBM					
Belum ada kegiatan terarah atau terprogram yang dilakukan berkaitan dengan kedisiplinan SDM di KPKNL Sidoarjo.	Gerakan Disiplin Keren adalah pembiasaan perilaku dan pola pikir yang terarah dan terprogram. Inovasi ini dibuat untuk dilakukan disetiap kegiatan yang ada di KPKNL Sidoarjo					

PROPOSAL INOVASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Sehat Segar Ceria (SSC)
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Pengembangan SDM
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2024 s.d. seterusnya
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Adanya kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan kesegaran secara jasmani dan rohani dalam meningkatkan semangat dan kinerja SDM sebagai asset utama dalam melaksanakan tupoksi dan melayani para stakeholders, KPKNL Sidoarjo mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh pegawai yaitu Sehat, Segar dan Ceria, sehingga tercipta pegawai yang : - Sehat- kuat dan bugar jasmani dan rohaninya, - Segar- penuh semangat/militan dalam berkinerja, dan - Ceria- selalu bahagia dalam bekerja, kekeluargaan dan kebersamaan
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Adanya beban berat pegawai dalam menjalankan tupoksi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan dalam melayani pengguna layanan secara maksimal, perlu dilakukan ‘maintenance’ jasmani dan rohani terhadap seluruh SDM sehingga tetap terjaga kesehatan, kesegaran, dan kebahagiaan para pegawai. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan capaian kinerjanya dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa/stakeholders. Karena pegawai yang kuat tentunya sangat menopang dan bermanfaat bagi pengguna jasa, dibandingkan dengan pegawai yang ‘lemah’. Untuk itu, perlu diciptakan kegiatan untuk me-nyehatkan, me-nyegarkan dan men-cerikan/membahagiakan seluruh pegawai khususnya pegawai KPKNL Sidoarjo.

3	Keselaran dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Sehat, Segar dan Ceria menciptakan pegawai yang kuat secara jasmani dan ruhani, segar penuh semangat dan militan serta kebahagiaan dalam bekerja sehingga pengembangan SDM dapat tercapai, kinerja dapat maksimal dan pelayanan kepada stakeholder akan meningkat.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Bagi Pegawai dan non pegawai (PPNPN) KPKNL Sidoarjo, terjaga kesehatan dan kebugaran secara fisik dan ruhani, terjaga semangat militansinya dan terjaga kebahagiaannya dalam berkinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. - Bagi Organisasi, kondisi pegawai yang prima akan sangat menunjang tercapainya target capaian kinerja pegawai dan organisasi. - Bagi stakeholders, pelayanan terhadap pengguna akan lebih meningkat - Tingkat kepuasan Pengguna Jasa akan semakin meingkat. Sebelum ada inovasi ini, tidak ada kegiatan yang terarah, terprogram dan terkoordinasi dalam menjaga kesehatan, kebugaran dan keceriaan. Dengan inovasi ini, kesehatan dan kebugaran pegawai dapat terjaga dengan kegiatan secara terarah, terprogram sehingga keceriaan/kebahagiaan pegawai dapat tercipta.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Adanya inovasi Sehat, Bugar dan Ceria, akan sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh setiap pegawai dan bagi organisasi (KPKNL) dan secara tidak langsung juga kepada pengguna layanan/stakeholders.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah kegiatan yang terarah dan terpadu untuk menyegarkan, menyehatkan dan men-ceriaan seluruh pegawai /ppnnpn KPKNL Sidoarjo (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi asli yang dikembangkan oleh Sub Bagian Umum pada KPKNL Sidoarjo, yang dapat dipakai oleh KPKNL lain sebagai replikasi atau modifikasi.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pengguna jasa maupun KPKNL. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi Sehat Segar dan Ceria menggunakan sumber daya Keuangan, SDM dan Sarana Prasarana. Untuk Keuangan dilakukan secara swadaya, dari dan untuk semua pegawai secara gotong royong untuk kebersamaan. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal) Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa serta internalisasi pada pegawai dan non pegawai pada KPKNL Sidoarjo yang dilakukan dengan menjadwalkan kegiatan secara teratur dan terarah untuk kegiatan sehat, segar dan ceria menjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk dilakukan. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia)

		Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL Sidoarjo dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan inovasi ini di KPKNL Sidoarjo. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Aspek Sosial : Inovasi Sehat Segar Ceria akan menciptakan kondisi sosial yang baik dan kondusif dalam wujud kenyamanan, kerukunan dan kekompakan serta kebersamaan seluruh pegawai dan non pegawai pada KPKNL Sidoarjo. Kondisi yang 'nyaman' tersebut, tentunya akan mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja nya. Aspek Ekonomi : Inovasi dilakukan melalui swadana, yaitu iuran secara sukarela dari pegawai KPKNL Sidoarjo sehingga prinsip dari dan untuk seluruh pegawai, sehingga tidak ada permasalahan secara ekonomi Aspek Lingkungan : Inovasi Sehat Segar dan Ceria ini akan berperan dalam usaha mengurangi penggunaan listrik dan sumber daya energi lainnya, dll.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan Seksi Kepatuhan Internal serta Kepala KPKNL Sidoarjo seluruh jajaran pimpinan/pejabat pada KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit yang bertugas memantau inovasi. Pelaporan dan monev juga dilakukan dari Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, dimana pelaporan kegiatan bimbingan mental dilakukan secara triwulanan. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi dan pelaksanaan inovasi Sehat, Segar dan Ceria yang sesuai peraturan perundangundangan telah berjalan dengan baik sesuai rencana atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian antara realisasi pelaksanaan kegiatan Sehat, Segara dan Ceria dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, ketepatan waktu dalam pelaporan kegiatan secara triwulanan dilakukan kepada Kanwil DJKN Jawa Timur. - Naiknya tingkat kepuasan pengguna layanan KPKNL Sidoarjo khususnya para pegawai dan non pegawai di lingkungan KPKNL Sidoarjo.. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk keberlanjutan dan perbaikan inovasi. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Seluruh pegawai dan non pegawai KPKNL Sidoarjo berperan aktif dalam kegiatan SSC ini - Dari Eksternal, diantaranya- Ustadz, pemandu senam dan narasumber lainnya merupakan pihak eksternal yang berperan dalam kegiatan SSC ini.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Sehat, Segar dan Ceria dapat memberikan dampak kepada seluruh pegawai dan non pegawai pada KPKNL Sidoarjo untuk lebih sehat, lebih segar/semangat dan lebih ceria sehingga akan meningkatkan kinerja yang terwujud dalam NKO (Nilai Kinerja Organisasi) menjadi lebih baik. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Kegiatan dalam hal ‘Sehat’ berupa olahraga bersama, ‘Segar’ berupa bimbingan mental rohani, kompetensi, psikologi serta ideologi, dan ‘Ceria’ berupa kegiatan outdoor/outbond, semuanya jarang dilakukan dan tidak terarah/terprogram serta tidak ada pelaporannya.</td><td>Kegiatan dalam hal ‘Sehat’ berupa olahraga bersama, ‘Segar’ berupa bimbingan mental rohani, kompetensi, psikologi serta ideologi, dan ‘Ceria’ berupa kegiatan outdoor/outbond, semuanya terlaksana dengan baik dan terarah/terprogram serta ada pelaporannya.</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Kegiatan dalam hal ‘Sehat’ berupa olahraga bersama, ‘Segar’ berupa bimbingan mental rohani, kompetensi, psikologi serta ideologi, dan ‘Ceria’ berupa kegiatan outdoor/outbond, semuanya jarang dilakukan dan tidak terarah/terprogram serta tidak ada pelaporannya.	Kegiatan dalam hal ‘Sehat’ berupa olahraga bersama, ‘Segar’ berupa bimbingan mental rohani, kompetensi, psikologi serta ideologi, dan ‘Ceria’ berupa kegiatan outdoor/outbond, semuanya terlaksana dengan baik dan terarah/terprogram serta ada pelaporannya.
Sebelum	Menuju WBBM					
Kegiatan dalam hal ‘Sehat’ berupa olahraga bersama, ‘Segar’ berupa bimbingan mental rohani, kompetensi, psikologi serta ideologi, dan ‘Ceria’ berupa kegiatan outdoor/outbond, semuanya jarang dilakukan dan tidak terarah/terprogram serta tidak ada pelaporannya.	Kegiatan dalam hal ‘Sehat’ berupa olahraga bersama, ‘Segar’ berupa bimbingan mental rohani, kompetensi, psikologi serta ideologi, dan ‘Ceria’ berupa kegiatan outdoor/outbond, semuanya terlaksana dengan baik dan terarah/terprogram serta ada pelaporannya.					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Layanan Penerbitan Kutipan Risalah Lelang
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Pelayanan Lelang (dahulu)
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Percepatan layanan penerbitan Kutipan Risalah Lelang yang cepat, tepat dan efisien sebagai salah satu upaya KPKNL Sidoarjo dalam peningkatan mutu pelayanan lelang. Berkaitan dengan hal itu, KPKNL Sidoarjo menawarkan sebuah layanan percepatan penerbitan Kutipan Risalah Lelang kepada pembeli lelang terutama bagi mereka yang berdomisili diluar Kabupaten Sidoarjo. Sebagai sebuah inovasi, layanan ini merupakan bentuk kemudahan setelah pelaksanaan lelang yang sesuai SOP diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan layanan ini bisa diselesaikan pada hari yang sama (<i>same day service</i>). Melalui layanan ini, kami ingin mempersembahkan citra pelaksanaan lelang yang cepat, transparan, akuntabel dan profesional.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarakan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Dengan pelaksanaan lelang secara online yang bisa diakses semua orang dimanapun mengakibatkan peningkatan jumlah penjualan barang yang diiringi dengan tersebarnya pembeli lelang yang domisilinya tidak hanya di Kabupaten Sidoarjo saja. Kami menyadari bahwa di era digitalisasi ini masyarakat berharap semua bisa dilakukan secara cepat, tepat dan efisien. Tantangan dan harapan masyarakat ini harus direspon dengan baik melalui perbaikan layanan. Untuk itu, KPKNL Sidoarjo berupaya untuk menawarkan gagasan percepatan layanan Penerbitan Kutipan Risalah Lelang pada hari yang sama (<i>same day service</i>).

3	Keselaranan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang memberikan kemudahan dan percepatan penyelesaian penerbitan Kutipan Risalah Lelang bagi pengguna jasa lelang. Layanan ini terkait dengan tatakelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pengguna jasa. Layanan penerbitan kutipan risalah lelang di hari yang sama (<i>same day service</i>) diharapkan mampu memberikan citra lelang yang baik sehingga kedepannya dapat meningkatkan penjualan lelang dan penerimaan PNBP
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dibandingkan SOP - Pengguna jasa/pembeli lelang merasa terlayani dengan baik. - Citra lelang menjadi lebih baik di mata masyarakat. Sebelum adanya inovasi ini, Seksi Pelayanan Lelang (dahulu) menerima permohonan hari ini dan pengambilan dilakukan keesokan harinya. Setelah ada inovasi ini, penerbitan kutipan risalah lelang menjadi lebih cepat, pekerjaan cepet terselesaikan, tumpukan pekerjaan menjadi berkurang, kepuasan pengguna jasa/pembeli terpenuhi..
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Berdasarkan feedback dari pengguna jasa, kemudahan yang didapat adalah kepastian waktu penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan layanan seperti biasa. Pengguna jasa/pembeli lelang tidak perlu datang beberapa kali ke KPKNL Sidoarjo untuk mendapatkan Kutipan Risalah Lelang.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai alat untuk memberikan kemudahan dengan percepatan layanan. Selain itu juga memberikan kepastian penyelesaian layanan yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Pelayanan Lelang (dahulu) yang berfungsi sebagai percepatan layanan bagi pengguna jasa lelang/pembeli lelang.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pemohon lelang, pemenang lelang, dan internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya). Inovasi percepatan layanan penerbitan merupakan inovasi yang dikembangkan dari SOP layanan penerbitan kutipan risalah lelang.
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang melibatkan fungsional Pelelang dan seluruh pelaksanafront office KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk kemudahan penyelesaian penerbitan kutipan risalah lelang. Pengguna jasa yang datang dapat langsung diberikan layanan dengan cepat dan dihari yang sama dapat menerima kutipan risalah lelang. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa. Selain itu internalisasi yang dilakukan oleh Petugas Front Office juga menjadi kunci utama keberhasilan layanan ini. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan layanan penerbitan kutipan risalah lelang. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempermudah dan mempercepat penerbitan kutipan risalah lelang kepada pengguna. Dilihat dari segi sosial, dengan adanya inovasi ini maka mempermudah pegawai untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna jasa/pembeli lelang. Dari segi sosial, inovasi ini sangat efektif digunakan karena mengurangi risiko terlalu lama dalam memberikan layanan..
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Fungsional Pelelang dibantu Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit yang bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian waktu penyelesaian yang tertera pada data yang tertulis dalam formulir layanan pasca lelang. - Pengambilan kutipan risalah lelang oleh pengguna jasa/pembeli lelang. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk perbaikan inovasi berupa konsistensi waktu penyelesaian penerbitan kutipan risalah lelang. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna jasa lelang, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Fungsional Pelelang dan Petugas Front Office KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif memberikan informasi terkait perhitungan tarif pelaksanaan lelang kepada stakeholders

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang dapat memberikan memberikan kepuasan kepada pengguna jasa lelang karena hak pengguna jasa/pembeli lelang lebih cepat terselesaikan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan citra lelang sebagai media jual beli yang cepat, akurat dan transparan. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Inovasi layanan penerbitan menggunakan sop penyelesaian 1 (satu) hari kerja</td><td>Inovasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang mempercepat penyelesaian menjadi haro yang sama (<i>same day service</i>)</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Inovasi layanan penerbitan menggunakan sop penyelesaian 1 (satu) hari kerja	Inovasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang mempercepat penyelesaian menjadi haro yang sama (<i>same day service</i>)
Sebelum	Menuju WBBM					
Inovasi layanan penerbitan menggunakan sop penyelesaian 1 (satu) hari kerja	Inovasi layanan penerbitan kutipan risalah lelang mempercepat penyelesaian menjadi haro yang sama (<i>same day service</i>)					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Percepatan Waktu Pelaksanaan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang Kepada Pembeli Lelang Same Day Service
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Hukum dan Informasi
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : **Tata Kelola Pemerintahan**

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Dibutuhkannya kecepatan dalam melayani Stakeholder dalam pengambilan Kuitansi Pembayaran Harga Lelang yang semula sesuai dengan KMK nomor:35/KMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan adalah 1 hari kerja, KPKNL Sidoarjo Memberikan komitmen memberikan dengan percepatan pada hari yang sama pada saat permohonan kuitansi dan persyaratan telah diterima.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambar/ jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Mempercepat dan mempermudah dalam pelayanan kepada stakeholder
3	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi percepatan waktu pemberian kuitansi pembayaran harga lelang kepada pembeli lelang merupakan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah stakeholder dalam pemberian kuitansi pembayaran harga lelang. Tatakelola pemerintahan yang baik berarti memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pengguna jasa.

4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap pengguna layanan KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pengguna layanan dapat lebih cepat menerima kuitansi pembayaran harga lelang - Dengan adanya percepatan tersebut, pengguna jasa dapat segera mengurus keperluan lainnya yang membutuhkan kuitansi pembayaran harga lelang dari KPKNL
5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai inovasi yang menjadikan para pengguna jasa pelayanan menjadi hemat waktu. Selain itu juga mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Hukum dan Informasi yang berfungsi sebagai percepatan pemberian layanan kepada pengguna jasa lelang.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pemenang lelang, dan internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya).

7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi ini melibatkan Bendahara Penerimaan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, dan seluruh pelaksana front office KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)
		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa. Selain itu internalisasi yang dilakukan oleh Petugas Front Office juga menjadi kunci utama memberikan edukasi terkait inovasi ini (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan informasi mengenai percepatan pemberian Kuitansi Lelang baik via media sosial kantor maupun saat di APT KPKNL Sidoarjo (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempersingkat waktu pemberian Kuitansi pembayaran harga Lelang kepada pengguna Dilihat dari segi sosial, inovasi ini sangat efektif digunakan karena mengurangi risiko terlalu lama dalam memberikan layanan..

8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal dibantu Bendahara Penerimaan yang merupakan Unit bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi inovasi ini telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.
		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian informasi yang disampaikan pada inovasi ini merupakan sangat penting karena informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang akurat dan diakui kebenarannya. - Kesesuaian norma waktu dimulai saat pengguna jasa mengajukan permohonan penerbitan kuitansi pembayaran harga lelang sampai dengan kuitansi terbit dan diserahkan kepada pemohon. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk melanjutkan inovasi tersebut. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna jasa lelang, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Fungsional Pelelang, Bendahara Penerimaan, dan Petugas Front Office KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif memberikan informasi terkait percepatan waktu pemberian kuitansi pembayaran lelang kepada stakeholders

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi ini memberikan kecepatan waktu pelayanan kepada pengguna jasa lelang. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan dan mempermudah pengguna jasa sehingga dapat dirasakan penghematan waktu yang didapatkan. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Norma waktu 1 hari kerja dapat menyebabkan pengguna jasa harus beberapa kali datang ke KPKNL untuk mendapatkan kuitansi pembayaran lelang</td><td>Dengan adanya inovasi ini, pengguna jasa cukup datang 1 kali ke KPKNL, dan dapat langsung menerima kuitansi pembayaran lelang saat itu juga.</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Norma waktu 1 hari kerja dapat menyebabkan pengguna jasa harus beberapa kali datang ke KPKNL untuk mendapatkan kuitansi pembayaran lelang	Dengan adanya inovasi ini, pengguna jasa cukup datang 1 kali ke KPKNL, dan dapat langsung menerima kuitansi pembayaran lelang saat itu juga.
Sebelum	Menuju WBBM					
Norma waktu 1 hari kerja dapat menyebabkan pengguna jasa harus beberapa kali datang ke KPKNL untuk mendapatkan kuitansi pembayaran lelang	Dengan adanya inovasi ini, pengguna jasa cukup datang 1 kali ke KPKNL, dan dapat langsung menerima kuitansi pembayaran lelang saat itu juga.					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : **Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL**
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Fungsional Penilai Pemerintah
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2023 s.d. seterusnya
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1

Ringkasan Singkat (Summary)

(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi)

Pengguna Jasa pelayanan berharap dapat diberikan pelayanan yang terbaik dan secara cepat. Kami KPKNL Sidoarjo ingin memberikan pelayanan yang lebih unggul dengan lebih mempercepat dari norma waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu sesuai KMK 601/KM1/2020 tentang SOP Layanan Unggulan Kemenkeu dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

dimana jangka waktu penyelesaian pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL.

Adapun jangka waktu maksimal penyelesaian pelayanan penilaian dalam rangka pemindahtanganan BMN/BMN adalah sebagai berikut:

Jumlah objek yang dimohonkan	Jangka waktu maksimal penyelesaian
	Pemindahtanganan BMN/BMD
Kendaraan: 1 s.d 10 Selain Kendaraan: 1. s.d 50	Paling lambat 33 hari kerja
Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d 100	Paling lambat 35 hari kerja
Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d 150	Paling lambat 37 hari kerja
dst. dengan kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan	Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan

kami percepat jangka waktu penyelesaian sebagai berikut:

Layanan penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan lebih cepat 2 hari kerja dari 33 hari kerja menjadi 31 hari kerja, 35 hari kerja menjadi 33 hari kerja dan 37 hari kerja menjadi 35 hari kerja. Dengan pelayanan yang lebih cepat ini kami berharap Kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa menjadi lebih meningkat.

2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Dalam rangka mempercepat standar Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL. KPKNL Sidoarjo berkomitmen memangkas jangka waktu penyelesaian layanan penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan lebih cepat 2 hari kerja dari 33 hari kerja menjadi 31 hari kerja, 35 hari kerja menjadi 33 hari kerja dan 37 hari kerja menjadi 35 hari kerja.
3	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi percepatan pelayanan penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan lebih cepat 2 hari kerja dari 33 hari kerja menjadi 31 hari kerja, 35 hari kerja menjadi 33 hari kerja dan 37 hari kerja menjadi 35 hari kerja, diharapkan dapat menunjang tata kelola pemerintahan, yaitu membantu para pengguna jasa layanan Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) untuk lebih cepat dalam pengambilan keputusan terkait objek penilaian.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap internal dan eksternal pegawai KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Bagi Pegawai KPKNL Sidoarjo, sebagai motivasi untuk membentuk kebiasaan, budaya, cara, dan sistem kerja pribadi yang efektif dan efisien serta cepat tanpa mengabaikan ketepatan dalam bekerja.. - Bagi Pemohon Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai pengguna jasa, dapat lebih cepat dalam pengambilan keputusan terkait objek penilaian. - Tingkat kepuasan Pengguna Jasa akan semakin meingkat. Dengan inovasi ini, terwujud percepatan pelayanan penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan lebih cepat 2 hari kerja atau lebih cepat (dengan tetap memprioritaskan ketepatan) dalam jangka waktu penyelesaiannya.

		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Adanya inovasi Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL, akan sangat dirasakan manfaatnya oleh pemohon layanan penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), karena proses tindaklanjut dalam permohonan penilaian akan juga dilakukan dengan lebih cepat sehingga nilai wajar/ nilai pasar/ nilai likuidasi/ nilai lainnya hasil dari penilaian itu sendiri juga akan semakin cepat dapat digunakan oleh pengguna jasa/ pemohon penilaian dalam membuat keputusan.
--	--	---

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah adanya Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi asli yang dikembangkan oleh Fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL Sidoarjo, yang dapat dipakai oleh KPKNL lain sebagai replikasi atau modifikasi.
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi pengguna jasa maupun KPKNL. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKN itu sendiri sebagai penyedia dokumen, Penilai Pemerintah pada KPKNL Sidoarjo, dan Kepala KPKNL Sidoarjo. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa serta internalisasi (terutama kepada para Penilai Pemerintah pada KPKNL Sidoarjo) yang dilakukan dengan menetapkan sebagai salah satu percepatan layanan yang dimasukkan dalam percepatan SOP KPKNL Sidoarjo dan menjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk dilakukan. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL Sidoarjo (terutama kepada para Penilai Pemerintah pada KPKNL Sidoarjo) dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan inovasi ini di KPKNL Sidoarjo. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) Aspek Sosial : Inovasi “Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL” ini akan membentuk karakter sosial para pegawai KPKNL Sidoarjo yang bekerja dengan efektif dan efisien dalam bekerja serta hemat. Aspek Ekonomi : Inovasi “Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL” mempercepat perputaran ekonomi nasional secara makro saat nilai wajar/ nilai pasar/ nilai likuidasi/ nilai lainnya hasil dari penilaian dapat segera digunakan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya terkait lelang, penerimaan PNBPN, dll. Aspek Lingkungan : Inovasi “Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL” ini akan berperan dalam usaha mengurangi penggunaan listrik dan sumber daya energi lainnya, dll.
--	--	---

8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada a. Target/kelompok sasaran; b. kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; c. Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Penilai Pemerintah dibantu Seksi Kepatuhan Internal serta Kepala KPKNL Sidoarjo yang merupakan Unit yang bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi inovasi Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.
---	-----------------------	---

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian standar Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL dan Inovasi Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL. - Naiknya tingkat kepuasan pengguna layanan KPKNL Sidoarjo terutama pengguna jasa layanan Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD). (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk keberlanjutan dan perbaikan inovasi. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna Jasa Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik daerah (BMD), yaitu Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja KPKNL Sidoarjo, Kepala Seksi PKN, Kepala Seksi PN, KPKNL Lain, Kanwil, Pemerintah Daerah dll. yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Penilai Pemerintah pada KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang terlibat langsung pelayanan Verifikasi Permohonan Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik daerah (BMD).

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Percepatan Pelayanan Penilaian Properti Dalam Rangka Pemindahtanganan Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan KPKNL yang merupakan layanan unggulan yang dapat memberikan efisiensi dan efektifitas pelayanan di KPKNL Sidoarjo sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa. Sebelum: <table><tr><th>Jumlah objek yang dimohonkan</th><th>Jangka waktu maksimal penyelesaian</th></tr><tr><td></td><th>Pemindahtanganan BMN/BMD</th></tr><tr><td>Kendaraan: 1 s.d 10 Selain Kendaraan: 1. s.d 50</td><td>Paling lambat 33 hari kerja</td></tr><tr><td>Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d 100</td><td>Paling lambat 35 hari kerja</td></tr><tr><td>Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d 150</td><td>Paling lambat 37 hari kerja</td></tr><tr><td>dst. dengan kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan)</td><td>Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan</td></tr></table> Sesudah: penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan lebih cepat 2 hari kerja dari 33 hari kerja menjadi 31 hari kerja, 35 hari kerja menjadi 33 hari kerja dan 37 hari kerja menjadi 35 hari kerja.	Jumlah objek yang dimohonkan	Jangka waktu maksimal penyelesaian		Pemindahtanganan BMN/BMD	Kendaraan: 1 s.d 10 Selain Kendaraan: 1. s.d 50	Paling lambat 33 hari kerja	Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d 100	Paling lambat 35 hari kerja	Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d 150	Paling lambat 37 hari kerja	dst. dengan kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan)	Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan
Jumlah objek yang dimohonkan	Jangka waktu maksimal penyelesaian													
	Pemindahtanganan BMN/BMD													
Kendaraan: 1 s.d 10 Selain Kendaraan: 1. s.d 50	Paling lambat 33 hari kerja													
Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d 100	Paling lambat 35 hari kerja													
Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d 150	Paling lambat 37 hari kerja													
dst. dengan kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan)	Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan													

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Percepatan Standar Layanan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/ atau Bangunan
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Pengguna Jasa pelayanan berharap dapat diberikan pelayanan yang terbaik dan secara cepat. Kami KPKNL Sidoarjo ingin memberikan pelayanan yang lebih unggul dengan lebih mempercepat dari norma waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu sesuai KMK 601/KM1/2020 tentang SOP Layanan Unggulan Kemenkeu dimana pelayanan Penetapan Status Penggunaan ditetapkan 5 hari kerja, kami percepat menjadi maksimal 3 hari kerja. Dengan pelayanan yang lebih cepat ini kami berharap Kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa menjadi lebih meningkat.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Dalam rangka mempercepat standar pelayanan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan dari norma waktu yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan SOP Layanan. Seksi PKN berkomitmen memangkas proses pemberian Penetapan Status Penggunaan BMN di wilayah KPKNL Sidoarjo dari 5 hari menjadi paling lama 3 hari kerja. Dengan pelayanan yang lebih cepat ini kami berharap Kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa menjadi lebih meningkat.

3	Keselaranan dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Percepatan Standar Layanan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/ atau Bangunan merupakan inovasi yang sangat menunjang pelayanan dan kepercayaan pengguna jasa KPKNL Sidoarjo sehingga tingkat kepuasan pengguna jasa akan lebih meningkat.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap Internal KPKNL Sidoarjo dan Pengguna Jasa KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Efisien dan efektifnya kinerja di KPKNL Sidoarjo - Permohonan PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan Pengguna jasa lebih cepat diproses dan diperoleh. - Tingkat kepuasan Pengguna Jasa akan semakin meingkat.. Sebelum adanya inovasi ini, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (dahulu) memproses permohonan PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan sampai 5 hari kerja. Setelah ada inovasi ini, maksimal 3 hari kerja permohonan PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan sudah diterbitkan.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kelelmahan tata Kelola, administrasi atau pelayanan pada KPKNL Sidoarjo karena Pelayanan PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan ini merupakan layanan unggulan yang menjadi tolak ukur baik buruknya tata kelola, administrasi atau pelayanan di KPKNL Sidoarjo. Dengan inovasi percepatan pelayanan PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan ini, KPKNL Sidaorjo lebih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Kebaruan dari inovasi ini adalah proses pemberian pelayanan yang merupakan layanan unggulan Kementerian Keuangan yang sudah ditetapkan standar waktu pelayanannya selama 5 hari kerja, KPKNL Sidoarjo membuat Inovasi SOP yang lebih cepat yaitu 3 hari kerja, melalui komitmen Bersama pegawai di KPKNL Sidoarjo untuk melaksanakannya khususnya bagian Seksi Pengelolaan Kekayaan negara. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang berfungsi mempersingkat proses penerbitan PSP BMN berupa tanah dan/ atau bangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa di KPKNL Sidoarjo..
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti meningkatkan kepuasan pengguna jasa KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya) dan adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi ini khusus melibatkan pegawai di Seksi PKN, pegawai di front office serta Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat terus diimplementasikan ke depan dan bahkan dipercepat jika semua pengguna jasa sudah <i>online</i> dalam system persuratan dengan system persuratan di Kementerian Keuangan. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa. Selain itu internalisasi yang dilakukan dengan menetapkan sebagai salah satu percepatan layanan yang dimasukkan dalam percepatan SOP KPKNL Sidoarjo dan telah menjadi kesepakatan bersama, menjadi salah satu pegawai di KPKNL Sidoarjo komitmen untuk menjalankan. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan inovasi ini di KPKNL Sidoarjo. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini ke depan akan dapat dipertahankan bahkan lebih dipercepat waktu pemberian penerbitan PSP tersebut, karena digunakan teknologi informasi sehingga ke depan permohonan PSP cukup melalui online atau melalui sistem persuratan yang sudah online sehingga prosesnya akan lebih cepat. Dengan kata lain sistem dan komunikasi online yang semakin berkembang akan memudahkan permohonan dan proses PSP dapat lebih cepat diproses.
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh seksi PKN dibantu oleh bagian Kepatuhan Internal KPKNL Sidoarjo. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi Percepatan standar pelayanan PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan ini berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian percepatan dalam standar pelayanan PSP BMN yaitu tidak melebihi waktu 3 hari kerja. - Kepuasan pengguna layanan di KPKNL Sidoarjo dibuktikan dengan selalu naiknya tingkat kepuasan pengguna layanan khususnya di bagian Pengelolaan kekayaan Negara.. (Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk percepatan standar pelayanan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan/ bangunan dapat terus dilaksanakan dan bisa dipercepat bila system persuratan semua pengguna jasa telah terintegrasi secara online.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna jasa di Bagian Pengelolaan kekayaan Negara, Yaitu Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja KPKNL Sidoarjo yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Pegawai di bagian Seksi PKN, front office dan Kepala KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang terlibat langsung menjalankan dan menginformasikan ke pengguna jasa.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Percepatan Standar Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan yang merupakan layanan unggulan Kementerian Keuangan dapat memberikan efisiensi dan efektifitas pelayanan di KPKNL Sidoarjo sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Standar Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan selama 5 hari kerja</td><td>Inovasi Percepatan Standar Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan menjadi hanya selama 3 hari kerja</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Standar Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan selama 5 hari kerja	Inovasi Percepatan Standar Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan menjadi hanya selama 3 hari kerja
Sebelum	Menuju WBBM					
Standar Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan selama 5 hari kerja	Inovasi Percepatan Standar Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan menjadi hanya selama 3 hari kerja					

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Percepatan Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) Same Day
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Hukum dan Informasi
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : **Tata Kelola Pemerintahan**

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Percepatan penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) dalam hari yang sama (same day), yaitu sejak penanggung utang (debitur) membayar lunas utangnya dan diterima secara sah oleh Bendahara Penerima, maka pada hari yang sama Anggota PUPN Cabang Sidoarjo mengeluarkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) untuk diberikan kepada penanggung utang (debitur).
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Mempercepat dan mempermudah dalam pelayanan kepada stakeholder

3	Keselaran dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi percepatan waktu pemberian Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) kepada penanggung utang merupakan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah stakeholder dalam pemberian SPPNL. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pengguna jasa.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap pengguna layanan KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Pengguna layanan dapat lebih cepat menerima SPPNL - Dengan adanya percepatan tersebut, pengguna jasa dapat segera mengurus keperluan lainnya yang membutuhkan SPPNL dari KPKNL
5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Keunikan dari inovasi ini adalah sebagai inovasi yang menjadikan para pengguna jasa pelayanan menjadi hemat waktu. Selain itu juga mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Hukum dan Informasi yang berfungsi sebagai percepatan pemberian layanan kepada pengguna jasa Piutang Negara.

6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (d disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti memberikan manfaat bagi penanggung utang, dan internal KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya), adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian), dan adjust (penyesuaian beberapa indikator penyusun inovasi dan/atau waktu penerapannya).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi ini melibatkan Bendahara Penerimaan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, dan seluruh pelaksana front office KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa. Selain itu internalisasi yang dilakukan oleh Petugas Front Office juga menjadi kunci utama memberikan edukasi terkait inovasi ini (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan informasi mengenai percepatan pemberian Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas baik via media sosial kantor maupun saat di APT KPKNL Sidoarjo (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih maksimal ke depan untuk mempersingkat waktu pemberian SPPNL kepada pengguna jasa. Dilihat dari segi sosial, inovasi ini sangat efektif digunakan karena mengurangi risiko terlalu lama dalam memberikan layanan..
8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada Target/kelompok sasaran; kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Hukum dan Informasi dibantu Bendahara Penerimaan yang merupakan Unit bertugas memantau inovasi. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi inovasi ini telah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi a. Kesesuaian informasi yang disampaikan pada inovasi ini merupakan sangat penting karena informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang akurat dan diakui kebenarannya. b. Kesesuaian norma waktu dimulai saat pengguna jasa membayar lunas utangnya sampai dengan SPPNL terbit dan diserahkan kepada penanggung utang. . (Gambar/Apa hasil evaluasi tersebut) <table><tr><td>Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk melanjutkan inovasi tersebut. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.</td><td></td></tr></table>	Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk melanjutkan inovasi tersebut. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.					
Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk melanjutkan inovasi tersebut. Saran dan masukan dari pengguna jasa juga merupakan poin penting pengembangan inovasi ini menjadi lebih baik.								
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) <table><tr><td>Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya:</td><td></td></tr><tr><td>1. Pengguna jasa piutang negara, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini.</td><td></td></tr><tr><td>2. Pegawai Seksi Hukum dan Informasi, Bendahara Penerimaan, dan Petugas Front Office KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif memberikan informasi terkait percepatan waktu penerbitan SPPNL kepada stakeholders</td><td></td></tr></table>	Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya:		1. Pengguna jasa piutang negara, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini.		2. Pegawai Seksi Hukum dan Informasi, Bendahara Penerimaan, dan Petugas Front Office KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif memberikan informasi terkait percepatan waktu penerbitan SPPNL kepada stakeholders	
Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya:								
1. Pengguna jasa piutang negara, yang memberikan feedback terhadap inovasi ini.								
2. Pegawai Seksi Hukum dan Informasi, Bendahara Penerimaan, dan Petugas Front Office KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang bertindak aktif memberikan informasi terkait percepatan waktu penerbitan SPPNL kepada stakeholders								
10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambar pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi ini memberikan kecepatan waktu pelayanan kepada pengguna jasa lelang. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan dan mempermudah pengguna jasa sehingga dapat dirasakan penghematan waktu yang didapatkan. <table><tr><td>Sebelum</td><td>Menuju WBBM</td></tr><tr><td>Norma waktu 1 hari kerja dapat menyebabkan pengguna jasa harus beberapa kali datang ke KPKNL untuk mendapatkan SPPNL</td><td>Dengan adanya inovasi ini, pengguna jasa cukup datang 1 kali ke KPKNL, dan dapat langsung menerima SPPNL saat itu juga.</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Norma waktu 1 hari kerja dapat menyebabkan pengguna jasa harus beberapa kali datang ke KPKNL untuk mendapatkan SPPNL	Dengan adanya inovasi ini, pengguna jasa cukup datang 1 kali ke KPKNL, dan dapat langsung menerima SPPNL saat itu juga.		
Sebelum	Menuju WBBM							
Norma waktu 1 hari kerja dapat menyebabkan pengguna jasa harus beberapa kali datang ke KPKNL untuk mendapatkan SPPNL	Dengan adanya inovasi ini, pengguna jasa cukup datang 1 kali ke KPKNL, dan dapat langsung menerima SPPNL saat itu juga.							

PROPOSAL INOVASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

- A. Judul Inovasi : Percepatan Standar Layanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan
- B. Unit Pemilik Inovasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
- C. Inovator : Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : 2021 s.d. Sekarang
- E. Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

1	Ringkasan Singkat (Summary)	(Uraikan paparan singkat mengenai latar belakang dan konsep inovasi) Pengguna Jasa pelayanan berharap dapat diberikan pelayanan yang terbaik dan secara cepat. Kami KPKNL Sidoarjo ingin memberikan pelayanan yang lebih unggul dengan lebih mempercepat dari norma waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu sesuai KMK 601/KM1/2020 tentang SOP Layanan Unggulan Kemenkeu dimana pelayanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan 7 hari kerja, kami percepat menjadi maksimal 5 hari kerja. Dengan pelayanan yang lebih cepat ini kami berharap Kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa menjadi lebih meningkat.
2	Tujuan Inovasi (Bobot 5%)	(Gambarkan/jelaskan tujuan “gagasan” munculnya inovasi ini) Dalam rangka mempercepat standar pelayanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan dari norma waktu yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan SOP Layanan. Seksi PKN berkomitmen memangkas proses pemberian Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan di wilayah KPKNL Sidoarjo dari 7 hari menjadi paling lama 5 hari kerja. Dengan pelayanan yang lebih cepat ini kami berharap Kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa menjadi lebih meningkat.

3	Keselarasn dengan kategori yang dipilih (bobot 5%)	(Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih) Inovasi Percepatan Standar Layanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan merupakan inovasi yang sangat menunjang pelayanan dan kepercayaan pengguna jasa KPKNL Sidoarjo sehingga tingkat kepuasan pengguna jasa akan lebih meningkat.
4	Signifikansi (Arti Penting) (bobot 15%)	(Inovasi harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok pengguna layanan/stakeholder) Inovasi ini berdampak positif terhadap Internal KPKNL Sidoarjo dan Pengguna Jasa KPKNL Sidoarjo diantaranya sebagai berikut: - Efisien dan efektifnya kinerja di KPKNL Sidoarjo - Permohonan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan Pengguna jasa lebih cepat diproses dan diperoleh. - Tingkat kepuasan Pengguna Jasa akan semakin meingkat.. Sebelum adanya inovasi ini, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (dahulu) memproses permohonan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan sampai 7 hari kerja. Setelah ada inovasi ini, maksimal 5 hari kerja permohonan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan sudah diterbitkan.
		(Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan pada unit kerja) Inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kelelmahan tata Kelola, administrasi atau pelayanan pada KPKNL Sidoarjo karena Pelayanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan ini merupakan layanan unggulan yang menjadi tolak ukur baik buruknya tata kelola, administrasi atau pelayanan di KPKNL Sidoarjo. Dengan inovasi percepatan pelayanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan, KPKNL Sidaorjo lebih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

5	Inovatif (kebaruan atau keunikan atau keaslian) (bobot 20%)	(Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks unit kerja) Kebaruan dari inovasi ini adalah proses pemberian pelayanan yang merupakan layanan unggulan Kementerian Keuangan yang sudah ditetapkan standar waktu pelayanannya selama 7 hari kerja, KPKNL Sidoarjo membuat Inovasi SOP yang lebih cepat yaitu Maksimal 5 hari kerja, melalui komitmen Bersama pegawai di KPKNL Sidoarjo untuk melaksanakannya khususnya bagian Seksi Pengelolaan Kekayaan negara. (Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain) Inovasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang berfungsi mempersingkat proses penerbitan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa di KPKNL Sidoarjo..
6	Transferabilitas (Sifat dapat konteks/tempat lain) (bobot 10%)	(Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan adaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah kerja atau unit lain) Ya, inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih maksimal ke depan oleh unit lain. Inovasi ini mudah untuk diterapkan dan diadaptasi oleh unit lain karena inovasi ini terbukti meningkatkan kepuasan pengguna jasa KPKNL Sidoarjo. (Jika Ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya) Unit lain dapat melakukan replikasi inovasi dengan prinsip adopt (mengambil seutuhnya) dan adapt (diadaptasi sesuai aspirasi/permasalahan, dan lingkungan pengendalian).
7	Sumber Daya dan Keberlanjutan (Bobot 10%)	(Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut) Inovasi ini khusus melibatkan pegawai di Seksi PKN, pegawai di front office serta Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo sebagai pelaksana inovasi. Inovasi ini dapat terus diimplementasikan ke depan dan bahkan dipercepat jika semua pengguna jasa sudah <i>online</i> dalam system persuratan dengan system persuratan di Kementerian Keuangan. (Langkah-langkah mobilisasi/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal)

		Publikasi inovasi ini merupakan langkah strategis menginformasikan kepada pengguna jasa. Selain itu internalisasi yang dilakukan dengan menetapkan sebagai salah satu percepatan layanan yang dimasukkan dalam percepatan SOP KPKNL Sidoarjo dan telah menjadi kesepakatan bersama, menjadi salah satu pegawai di KPKNL Sidoarjo komitmen untuk menjalankan. (Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini?Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia) Keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini terus dilakukan hingga saat ini dengan adanya komitmen dan tekad untuk melanjutkan inovasi yang telah dibuat pada setiap periodenya. Sumber daya yang dimiliki oleh KPKNL dituntut untuk selalu memiliki rasa integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan inovasi ini di KPKNL Sidoarjo. (Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan)) Keberlanjutan dari inovasi ini ke depan akan dapat dipertahankan bahkan lebih dipercepat waktu pemberian penerbitan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan tersebut, karena digunakan teknologi informasi sehingga ke depan permohonan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan cukup melalui online atau melalui system persuratan yang sudah online sehingga prosesnya akan lebih cepat. Dengan kata lain system dan komunikasi online yang semakin berkembang akan memudahkan permohonan dan proses Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan dapat lebih cepat diproses.
--	--	--

8	Dampak (Bobot 15%)	(Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan APIP atau lembaga lain relevan) (Jika Ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada a. Target/kelompok sasaran; b. kelompok masyarakat luar kelompok sasaran; c. Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh seksi PKN dibantu oleh bagian Kepatuhan Internal KPKNL Sidoarjo. Inovasi ini dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan dimana Kepala Kantor memantau apakah implementasi Percepatan standar pelayanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan ini berjalan dengan baik atau perlu dilakukan optimalisasi terhadap inovasi tersebut.
---	-----------------------	---

		(Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu) Indikator yang digunakan dalam penilaian yaitu meliputi - Kesesuaian percepatan dalam standar pelayanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan yaitu tidak melebihi waktu 5 hari kerja. - Kepuasan pengguna layanan di KPKNL Sidoarjo dibuktikan dengan selalu naiknya tingkat kepuasan pengguna layanan khususnya di bagian Pengelolaan kekayaan Negara.. (Gambar/ Apa hasil evaluasi tersebut) Dengan adanya indikator-indikator evaluasi di atas maka didapatkan gambaran untuk percepatan standar pelayanan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan dapat terus dilaksanakan dan bisa dipercepat bila system persuratan semua pengguna jasa telah terintegrasi secara online.
9	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan Kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)	(Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini) Inovasi ini melibatkan semua internal dan eksternal KPKNL Sidoarjo, diantaranya: - Pengguna jasa di Bagian Pengelolaan kekayaan Negara, Yaitu Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja KPKNL Sidoarjo yang memberikan feedback terhadap inovasi ini. - Pegawai di bagian Seksi PKN, front office dan Kepala KPKNL Sidoarjo selaku pelaksana inovasi yang terlibat langsung menjalankan dan menginformasikan ke pengguna jasa.

10	Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)	(Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas) Inovasi Percepatan Standar Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan yang merupakan layanan unggulan Kementerian Keuangan dapat memberikan efisiensi dan efektifitas pelayanan di KPKNL Sidoarjo sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan dan tingkat kepuasan pengguna jasa. <table><tr><th>Sebelum</th><th>Menuju WBBM</th></tr><tr><td>Standar Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan selama 7 hari kerja</td><td>Inovasi Percepatan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan menjadi hanya selama 5 hari kerja</td></tr></table>	Sebelum	Menuju WBBM	Standar Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan selama 7 hari kerja	Inovasi Percepatan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan menjadi hanya selama 5 hari kerja
Sebelum	Menuju WBBM					
Standar Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan selama 7 hari kerja	Inovasi Percepatan Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/ atau Bangunan menjadi hanya selama 5 hari kerja					

LAMPIRAN 5

Bukti Replikasi Inovasi KPKNL Sidoarjo



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN JUANDA

JALAN RAYA BANDARA JUANDA KM 3-4, SIDOARJO 61253
TELEPON (031) 8667559; FAKSIMILE (031) 8667578; LAMAN www.bcjuanda.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bcjuanda@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-629/KBC.1103/2023

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
Dari : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean Juanda
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Replikasi Aplikasi Lacak Debitur
Tanggal : 5 April 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara nomor ND-760/KNL.1002/2023 tanggal 03 April 2023 hal Replikasi Inovasi Lacak Debitur, bersama ini kami ucapkan terimakasih atas upaya KPKNL Sidoarjo dalam menelusuri keberadaan penanggung hutang atas penyerahan piutang macet KPPBC TMP Juanda dan kami akan ikut menggunakan aplikasi lacak debitur guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penagihan piutang macet KPPBC TMP Juanda.

Demikian disampaikan, atas perhantiannya kami ucapkan terimakasih.

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Gatot Hartono





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. (0321) 322744 email : bpkakabmojokerto79@gmail.com

Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

Mojokerto, 28 Juli 2023

Nomor : 900/1180/416-203.3/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Replikasi Inovasi
KPKNL Sidoarjo 'Lacak Debitur'

Kepada
Yth.Sdr. Kepala KPKNL Sidoarjo
Jl. Erlangga 161 Sidoarjo
di
S I D O A R J O

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: S-921/KNL.1002/2023 Tanggal 16 Maret 2023 Perihal Replikasi Inovasi KPKNL Sidoarjo 'Lacak Debitur', dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi adanya inovasi 'Lacak Debitur' KPKNL Sidoarjo yang sangat berguna dalam efisiensi dan efektivitas dalam penagihan piutang daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyatakan siap dan akan menggunakan replikasi inovasi 'Lacak Debitur' guna meningkatkan penagihan piutang yang telah kami serahkan ke KPKNL Sidoarjo. Selanjutnya, kami mengharapkan arahan dari Saudara terkait teknis penggunaan aplikasi 'Lacak Debitur' tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
sebagai Laporan

